

ISBN: 978-623-6963-30-2



BUNGA RAMPAI
DINAMIKA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI ASIA PASIFIK:
PEMIKIRAN PILIHAN DARI MAHASISWA
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL



DISUNTING OLEH:
DARYNAUFAL MULYAMAN, S.S., M.Si.
WILLIAM SULISTYO WIBOWO

© 2021

Pemikiran Pilihan dari Mahasiswa HI

BUNGA RANPAI

©Universitas Kristen Indonesia 2021

Tim Editorial
Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si.
William Sulistyو Wibowo

Layout
Jessica Natapradja

ISBN:978-623-6963-30-2

ISBN 978-623-6963-30-2



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami selaku pengampu mata kuliah (MK) Dinamika Asia Pasifik 2020/2021 kelas B-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia masih diberikan kesempatan untuk merancang bunga rampai dari hasil karya pemikiran mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kelas ini. Karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah karya tulis yang sudah melewati proses berpikir ilmiah dan menyocokkannya dengan data yang ada. Maka dari itu, sebuah kebanggaan tersendiri dalam menyusun bunga rampai yang bermaksud menampilkan hasil proses pemikiran ilmiah para mahasiswa yang mengikuti kelas ini dalam bentuk yang belum umum di FISIPOL UKI, yaitu bunga rampai.

Proposal ini berdasarkan dari pemikiran dosen pengampu kelas B-1 MK Dinamika Asia Pasifik 2020/2021 Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UKI, Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si. bersama para mahasiswa yang terlibat, yaitu Renalda Ester Angkouw, Rudi Pangidoan, Mikhail Adam, Hinggil Larasati, Timothy Rompies, Michael David Rinding Padang, Evangelista Myra Hardi Chrisselina, Adinda Salsabilla Riyalda, Rana Yusrianti Meilina, Valentino, dan William Sulisty Wibowo untuk memberikan hasil karya yang sudah dibuat pada kelas B-1 MK Dinamika Asia Pasifik 2020/2021 untuk dibagikan kepada khalayak ramai dengan tujuan guna mengedukasi dan mengdiseminasi informasi terkait pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik.

SELAMAT MEMBACA DAN BAGI MAHASISWA, TERUSLAH BERKARYA!

DAFTAR ISI

PROLOG	v
<i>Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Rezim Ramah Lingkungan dan Komitmen</i>	
Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si.	
PROLOG	vii
<i>Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Respon Serta Upaya Tanggungjawab Bersama dalam Membangun Dunia yang Lebih Baik</i>	
William Sulistywo Wibowo	
<i>Dampak New Southern Policy Korea Selatan dalam Bidang Globalisasi dan Pariwisata Berkelanjutan di Kamboja</i>	1
Renalda Ester Angkouw	
<i>Efektivitas Kerja Sama Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Menghadapi Pemanasan Global</i>	6
Rudi Pangidoan	
<i>Diskursus Pemberdayaan Energi Alternatif</i>	15
Mikhail Adam	
<i>Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik pada Globalisasi</i>	23
Hinggil Larasati	
<i>Dampak Perubahan Iklim Kepada Pembangunan dan Diplomasi di Asia Pasifik</i>	28
Timothy Rompies	
<i>Konsep Blue Economy di Kawasan Asia Pasifik</i>	31
Michael David Rinding Padang	
<i>Upaya ASEAN Dalam Mengatasi Kabut Asap Lintas Perbatasan Singapura dan Malaysia Akibat Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Tahun 2019</i>	37
Evangelista Myra Hardi Chrisselina	
<i>Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Salah Satu Opsi Pembangunan di Kawasan Asia Pasifik</i>	43
Adinda Salsabilla Riyalda	

DAFTAR ISI

<i>Dampak Perubahan Iklim pada Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik (Studi Kasus Dampak Pola Pertumbuhan Ekonomi di India dalam Pencemaran Iklim Emisi CO2)</i>	49
Rana Yusrianti Meilina	
<i>Pengaruh Globalisasi terhadap Program Sustainable Development Goals di Asia Pasifik</i>	54
Valentino	

PROLOG

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Rezim Ramah Lingkungan dan Komitmen

Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si.

Lingkungan menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Efek perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi lingkungan tepat manusia hidup. Perubahan ini melewati batas-batas negara dan menjadi isu bersama di tingkat regional, bahkan global. Asia sebagai benua dengan jumlah penduduk terbanyak di bumi tentu saja tidak luput dari isu lingkungan. Seperti maraknya bencana alam, penyakit, kekurangan air bersih, kelaparan, hingga menipisnya sumber-sumber energi. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pintu gerbang menuju jenis baru ekonomi dan pertumbuhan yang juga memikirkan dampak sosial dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan banyak dibincangkan oleh akademisi dan politisi. Beban kompleks dan multi-sektor yang ada di dalam konsep pembangunan berkelanjutan tentu saja menjadi dinamika tersendiri sehingga isu ini menjadi multi-dimensional. Hubungan internasional pun tidak lepas dari isu tersebut. Sejak dimulainya SDGs pada tahun 2015, banyak negara mencoba membantu memecahkan masalah yang timbul dengan pendekatan 'berkelanjutan' (UNDP, 2021). Kendati demikian, walaupun rezim pembangunan ini mencoba ramah terhadap lingkungan, tetap saja komitmen dan political will dari negara-negara di dunia, termasuk di

Asia Pasifik masih dapat diragukan. Sampah plastik, polusi udara, perubahan iklim dan cuaca, penyakit yang bermunculan, dan bencana alam masih banyak dijumpai di negara-negara Asia Pasifik, walaupun termasuk yang sudah mengadopsi SDGs.

Bahkan, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyebutkan bahwa negara-negara Asia Pasifik tidak dalam jalur untuk mencapai tujuan SDGs (Septiari, 2020). Walaupun demikian, tidak semua negara-negara di Asia Pasifik acuh dengan isu lingkungan dan berkomitmen penuh terhadap isu ini. Korea Selatan misalnya, berniat untuk menginisiasi kerja sama ekonomi yang berbasis lingkungan dengan negara-negara yang ada di kawasan Laut Kuning (Kim Yon-Se, 2020). Lalu, Lee dan Woo (2020) juga menyebutkan bahwa pada era Presiden Moon Jae-In, Korea Selatan memiliki manifesto ramah lingkungan yang disebut dengan 'Green New Deal'. Green New Deal ini berisi bagaimana strategi transisi Korea Selatan untuk memenuhi konsumsi energi dengan energi yang hemat, ramah lingkungan, terbarukan, dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya mobil listrik.

Korea Selatan juga sudah mempunyai komitmen tersendiri mengenai kendaraan listrik dengan

investasi besar pabrik pembuatan mobil listrik dan baterainya di Indonesia (Nasori, 2019; Akhlas, 2020).

Komitmen yang dibawa Korea ini juga terangkum dalam politik luar negerinya untuk lebih meluaskan jaringnya di Kawasan Asia Tenggara dan Selatan, melalui Indonesia dalam payung 'New Southern Policy' (Lee Jae-Hyeon, 2019). Oleh karena itu, hal yang perlu digarisbawahi oleh negara-negara di Asia Pasifik adalah perlunya komitmen yang besar dalam menjalani rezim ramah lingkungan di semua sektor, termasuk menyetel ulang politik luar negeri dan kepentingan nasional guna selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Isu-isu seperti ini akan banyak dibahas pada bunga rampai 'Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Pemikiran Pilihan dari Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional'. Mulai dari isu pariwisata yang berkelanjutan, globalisasi dan pembangunan berkelanjutan, diplomasi mengenai pembangunan berkelanjutan, penanganan krisis bencana asap, dan masih banyak lainnya. Bunga rampai ini adalah kurasi dari hasil pemikiran mahasiswa-mahasiswa yang dipilih dan berisi analisis yang relevan untuk perkembangan dinamika pada bidang pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik.

PROLOG

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Respon Serta Upaya Tanggungjawab Bersama dalam Membangun Dunia yang Lebih Baik

William Sulistyو Wibowo

Pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi salah satu agenda prioritas bagi negara-negara di Asia Pasifik, setidaknya selama satu dekade ini. Munculnya perubahan iklim yang sangat labil serta semakin derasnya pembangunan tanpa memperhatikan keadaan sekitar membuat dunia semakin sakit dan kehidupan manusia makin terganggu. Perubahan Iklim – yang merupakan salah satu isu dalam pembangunan berkelanjutan kini telah melintasi batas negara. Hal ini membuat persoalan kerusakan lingkungan telah menjadi tanggungjawab dan agenda bersama baik di tingkat regional, internasional hingga global. Selain isu perubahan iklim yang telah merusak alam, isu seperti kemiskinan, kelaparan, peningkatan Pendidikan, ketersediaan air bersih, hingga menjaga ekosistem laut adalah berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya yang juga harus mendapatkan porsi perhatian yang sama dan perlu diperhatikan bersama.

Asia Pasifik adalah kawasan yang memiliki cakupan yang luas. Banyak negara-negara berkembang di dalam kawasan ini membuat tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan sulit untuk dicapai.

Prioritas pembangunan ekonomi serta upaya stabilitas politik masih menjadi 'hidangan favorit' bagi negara-negara di Asia Pasifik. Namun dipihak lain, pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi perhatian utama bagi seluruh dunia dalam menghadapi era kontemporer ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Asia Pasifik tidak berada dalam jalur untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (ESCAP, 2019).

Pada prakteknya, tidak semua negara-negara Asia Pasifik mengesampingkan agenda tersebut. Masih ada negara-negara yang memiliki kesadaran serta tanggungjawab untuk mencapai program pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama ekonomi dan diplomasi. Tiongkok telah menjadi salah satu negara di Asia Pasifik yang masih memasukkan pembangunan berkelanjutan dalam rencana kebijakan publiknya. Pemberantasan kemiskinan telah menjadi perhatian utama pemerintah Tiongkok selama 10 tahun (Xiheng, 2019) Dalam konteks HI, Tiongkok yang telah memiliki proyek ambisus seperti BRI dan AIIB juga telah bermitra dengan UNDP, untuk menciptakan infrastruktur

yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang semakin nyaman untuk ditinggalkan (Putten & Martin, 2020). Investasi Tiongkok dalam energi terbarukan meningkat 12.6 gigawatt sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 (Reuters, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah persoalan mengenai rasa tanggungjawab dan kepentingan kita bersama. Perlu adanya mitra serta aktor untuk membantu mencapai tujuan-tujuan ini.

Berbagai isu pembangunan berkelanjutan lainnya juga dapat ditemukan dalam bunga rampai 'Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Pemikiran Pilihan dari Mahasiswa'. Isu Pariwisata, globalisasi, serta ekonomi dikemas dengan satu topik besar yakni, pembangunan berkelanjutan. Bunga rampai ini merupakan karya kompilasi dari hasil pemikiran mahasiswa-mahasiswa yang dipilih. Terdapat pula analisis yang sekiranya dapat menjadi referensi dalam mengikuti konstelasi HI kontemporer.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Dampak New Southern Policy Korea Selatan dalam Bidang Globalisasi dan Pariwisata Berkelanjutan di Kamboja

Renalda Ester Angkouw

ABSTRAK

Globalisasi telah membuat transaksi Korea Selatan dan negara-negara ASEAN dalam antarnegara lebih cepat dan ketat di semua bidang, termasuk pasar dunia dan pertukaran manusia. ASEAN ada untuk kerja sama ekonomi sepuluh negara Asia Tenggara dan sebagai fondasi perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN menarik banyak perhatian dalam periode globalisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, kapasitas ekonomi, dan populasi pemuda yang signifikan. Korea Selatan juga telah berusaha untuk menjauh dari empat kekuatan utama (AS, Rusia, Cina, Jepang) dan pindah ke Asia Tenggara untuk memperluas cakrawala politik dan ekonominya. Ketertarikan Moon Jae-In terhadap negara-negara ASEAN menunjukkan kebijakan luar negeri Korea Selatan pada 2017 (New Southern Policy).

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi ikhtisar Kebijakan Selatan Baru Korea Selatan dan dampaknya terhadap Korea Selatan dan negara-negara ASEAN. Kebijakan Selatan Baru, yang berfokus pada 3P (People, Prosperity, Peace), telah mengembangkan dan memperkenalkan kebijakan untuk mempromosikan pertukaran manusia, kerja sama ekonomi, dan kerja sama pertahanan antara

rangka menumbuhkan kemakmuran win-win antara Korea dan ASEAN. Selain itu, kebijakan ini juga memperluas cakrawala diplomatik Korea-ASEAN, seperti dalam pariwisata berkelanjutan dan lebih banyak keterlibatan terhadap globalisasi. Terutama untuk negara-negara ASEAN yang paling tidak maju, seperti Kamboja.

Kata Kunci: New Southern Policy, Kebijakan Luar Negeri, Hubungan Diplomatik ASEAN, Korea Selatan.

ABSTRACT

Globalization has made transactions between countries faster and stricter in all fields, including the world market and human exchanges. ASEAN exists for the economic cooperation of the ten countries of South-East Asia and the foundation for peace in the South East Asian region. ASEAN countries are attracting a great deal of attention in the globalization period with fast economic growth, economic capacity, and a significant youth population. South Korea has also sought to move away from the

four main-powers (US, Russia, China, Japan) and move into Southeast Asia to extend its political and economic horizons. Moon Jae-In's interest in ASEAN countries showed in the foreign policy of South Korea in 2017 (New Southern Policy). This research seeks to identify an overview of South Korea's Current New Southern Policy and its effects and impacts on South Korea and ASEAN countries. New Southern Policy, focused on 3P (People, Prosperity, Peace), has developed and introduced policies to promote human exchanges, economic cooperation, and defense cooperation between South Korea and ASEAN countries in order to foster a win-win prosperity between Korea and ASEAN. Furthermore, the policy also broadens Korea-ASEAN diplomatic horizons, such as in sustainable tourism and more engagement to globalization. Especially for ASEAN least developed countries, such as Cambodia.

Keywords: New Southern Policy, Foreign Policy, Diplomatic Relations, ASEAN, South Korea.

PENDAHULUAN

New Southern Policy (NSP) oleh Korea Selatan bertujuan untuk membangun komunitas baru antara Korea dan negara-negara sasaran NSP, dalam hal ini ASEAN dan India. Melalui menumbuhkan semangat komunal yang mendorong Korea dan kawasan NSP untuk saling memandang sebagai tetangga sejati. NSP sendiri memiliki visi mereka sendiri, "Komunitas Perdamaian dan Kesejahteraan yang berpusat pada rakyat". Berarti Korea ingin menciptakan komunitas yang menghargai dan menghubungkan masyarakat, komunitas yang bisa

berbagi kemakmuran berdasarkan saling menguntungkan dan komunitas yang bisa berkontribusi dalam menjaga dan menstabilkan perdamaian kawasan.

Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal dengan CLMV, adalah sekelompok negara di ASEAN yang merepresentasikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan peningkatan konsumsi, lokasi dan akses yang strategis, sumber daya alam yang kaya seperti minyak, gas tembaga. Kamboja adalah salah satu negara yang paling berkembang yang ada di itu cara untuk menjadi negara ekonomi menengah. Ada banyak faktor mengapa Kamboja bisa berubah menjadi negara ekonomi berproduksi menengah. Ada industri garmen, konstruksi dan pariwisata. Sementara infrastruktur pakaian dan pariwisata merupakan pendorong di belakang pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian menyumbang sekitar 35% dari PDB dan mempekerjakan sebagian besar penduduk (Bank Dunia, 2016).

Maka dari itu, pertanian penting untuk pengurangan kemiskinan dan pemberantasan kelaparan di Kamboja. Kamboja diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanah dan air, kondisi iklim yang menguntungkan dan posisi geografis, yang mewakili keunggulan komparatif potensial untuk peningkatan produksi pertanian dan peningkatan mata pencaharian. Produksi tanaman menghasilkan sekitar 54% dari PDB di negara ini, sementara perikanan menyumbang 25%, peternakan menyumbang 15% dan kehutanan dan pennebangan menyumbang sekitar 6%. Meski hanya 8% beras yang diairi, produksi beras terus meningkat.

Tanaman pangan penting tertentu antara lain jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan buah-buahan seperti mangga, nanas, nangka, durian, rambutan dan pisang. Tanaman komersial, khususnya tebu dan karet dan kelapa sawit, juga mengalami ekspansi yang signifikan. Ikan merupakan sumber protein utama untuk makanan masyarakat dan budidaya laut serta penangkapan ikan air tawar di danau dan sungai, khususnya di Tonle Sap dan Mekong, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan, lapangan kerja dan ketahanan pangan. Sektor peternakan tertinggal dengan hewan kecil seperti babi, bebek dan ayam yang dipelihara terutama untuk konsumsi rumah tangga. Apa yang akan terjadi pada CLMV, khususnya Kamboja, jika Kebijakan Selatan Baru Korea Selatan berhasil? Bagaimana SDGs di Asia Pasifik dapat menumbuhkan/mempercepat proses globalisasi?

Sebagai salah satu negara CLMV, Kamboja mendukung perekonomian sekitarnya. Sebagai anggota ASEAN, 4 negara tersebut merupakan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di ASEAN diikuti oleh Indonesia dan Thailand. ASEAN yang menjalin hubungan dengan Korea Selatan tentunya akan berdampak besar bagi negara-negara CLMV tersebut termasuk Kamboja. Kebijakan New Southern Korea Selatan memiliki visi unik mereka yaitu 3P, People, Prosperity, dan Peace. Mereka ingin membuat saling pengertian yang lebih besar melalui perluasan pertukaran, ini dapat dilakukan dengan Peningkatan jumlah pengunjung kolektif, dua arah pertukaran budaya, pengembangan efisiensi SDM, yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola India dan ASEAN untuk hidup di Korea dan Mem-

berikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pada konsep “Kemakmuran”, Korea Selatan ingin membangun basis yang dapat saling menguntungkan, berorientasi ke masa depan dan untuk melancarkan kerjasama ekonomi. Cara mereka mendekati hal ini adalah dengan Memperkuat kerangka kelembagaan untuk perdagangan dan investasi yang lebih besar, berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk konektivitas yang lebih besar, kerjasama UMKM dan peningkatan akses pasar, meningkatkan kompetensi pertumbuhan inovatif melalui industri baru dan kerjasama cerdas, mengembangkan model koperasi yang disesuaikan dengan masing-masing negara dan dalam “Damai”, kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun lingkungan yang damai dan aman di wilayah yang terkena kebijakan.

Perdamaian merupakan salah satu faktor utama untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain. Tidak mudah untuk mencapai perdamaian, tetapi NSP memiliki cara sendiri untuk mencapainya. Seperti, Meningkatkan interaksi antara Kepala Negara dan pejabat tinggi sehingga komunikasi yang lebih baik menciptakan dunia yang damai, meningkatkan kerja sama dalam membangun Semenanjung Korea yang damai dan sejahtera, memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan pertahanan nasional, tanggapan bersama terhadap anti-terorisme dan keamanan dunia maya dan maritim, meningkatkan daya tanggap terhadap tantangan kawasan.

Dengan mengetahui visi NSP berikutnya, “people” bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung grup, memperluas pertukaran budaya dua arah yang mendukung hak masyarakat ASEAN untuk tinggal di Korea dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun hal ini mengarah pada hal yang terkenal yang disebut Pariwisata dan Globalisasi. Orang-orang telah melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain sejak usia dini ketika mereka hidup dalam kelompok kecil, berburu dan mengumpulkan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Gerakan rakyat menjadi lebih jelas ketika negara-bangsa muncul. Kami telah bergerak di dalam atau melintasi batas untuk berbagai tujuan, seperti perjalanan, perdagangan, migrasi, penyebaran budaya dan penyebaran pengetahuan dan pemahaman; dengan demikian mengarah pada perkembangan peradaban manusia.

Industri pariwisata adalah industri baru di Kamboja. Sejak imperialisme, kudeta, Khmer Merah, invasi Vietnam, dan perang saudara yang berkepanjangan, kita tidak tahu persis kapan pariwisata dimulai di Kamboja. Meskipun demikian, saya berasumsi bahwa itu dimulai ketika pemerintah Kamboja beralih dari ekonomi terpusat ke ekonomi pasar bebas pada tahun 1989 pada saat yang sama ketika Pemerintah Vietnam setuju untuk menarik pasukannya dari Kamboja di bawah tekanan internasional. Dan pemilu pertama tahun 1993, di bawah pengawasan Otoritas Transisi PBB di Kamboja (UNTAC), mengubah citra negara dari perang yang berkepanjangan dan tempat yang tidak stabil menjadi negara yang damai (UNTAC-

Kamboja, 2003). Ini membantu membuka jalan untuk menarik turis asing ke negara itu. Pada tahun 1994, statistik pariwisata secara resmi dicatat oleh Kementerian Pariwisata. 176.617 turis internasional telah tiba di negara itu dan jumlahnya meningkat secara bertahap.

Maka dari itu, merunut pada transformasi Kamboja pada era globalisasi, pariwisata menjadi salah satu faktor penting bagi perekonomian Kamboja. Globalisasi melalui perkembangan dinamika politik regional dan teknologi informasi mampu memberikan jalan yang terbuka bagi interaksi antar negara untuk lebih mengeksplorasi sumber pertumbuhan ekonomi. Pada tulisan ini yaitu eksplorasi di bidang pariwisata sebagai alternative pertumbuhan ekonomi Kamboja oleh Korea Selatan dalam perspektif globalisasi yang dirangkai lewat kebijakan diplomasinya, yaitu NSP.

ANALISIS

Visi 3P NSP terkait satu sama lain, misalnya “Rakyat” dan “Kesejahteraan” memiliki keterkaitan dengan saling menggapai visi. Visi “Rakyat” ingin menjadikan individu di masing-masing negara menjadi lebih bebas dan dengan demikian akan membuat “Kemakmuran” yang menguntungkan orang lain, berorientasi ke masa depan dan terjalin kerjasama ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Ini menciptakan konsep yang disebut Pariwisata, di mana orang-orang dari Negara A pergi ke Negara B, akibatnya, Negara B akan mendapatkan keuntungan dari Wisatawan tersebut. Ini berlaku untuk negara mana pun di dunia, termasuk Kam-

-boja. Beberapa tahun terakhir, pariwisata telah diklaim sebagai sektor penting yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Kamboja. Berdasarkan statistik dari National Bank of Cambodia (2020), dan pada Desember 2018, mencapai rekor tertinggi yang pernah ada di Kamboja, dengan kedatangan lebih dari 700.000 orang pelancong.

Hal ini dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah wisatawan di Kamboja tampaknya terjadi pada saat yang sama saat globalisasi yang ada semakin dalam, tahun 2018 merupakan tahun terbaik ASEAN, dengan mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia (Shofa, 2019). Pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kamboja mungkin dapat lebih sering jika terjadi ditambah dengan NSP Korea berhasil, karena akan menambah jejaring investasi yang masuk ke dalam Kamboja. Korea Selatan, melalui KOICA dan KOTRA, berhasil menumbuhkan kerja sama dan pertumbuhan bagi Kamboja. OECD (2018) menyebutkan bahwa Korea dan Kamboja menjalin ikatan ekonomi yang lebih dekat, terutama melalui perdagangan, migrasi, bantuan, dan pariwisata. OECD (2018) melansir bahwa, investasi signifikan Korea dalam manufaktur, pariwisata, dan pertanian, bersama dengan program migrasi tenaga kerja sementara yang besar dan aliran pengiriman uang yang tinggi, membantu mengaalkan dan memperluas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aliran sumber daya ke Kamboja.

Lalu, data KOTRA di OECD (2018) juga mengungkapkan bahwa ada rencana untuk mendukung ekspor mangga Kamboja ke Korea, dan sebuah perusahaan Korea juga telah berinvestasi dalam sistem ekspor untuk produk pertanian termasuk karantina, pengemasan dan penyimpanan dingin. Upaya tersebut bertujuan untuk mendukung pening-

katan perdagangan yang signifikan. Lalu, OECD (2018) juga menyebut, Korea telah membuat kemajuan dalam pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi penilaian proyek; ini sekarang diperluas ke disabilitas dan kelestarian lingkungan di Kamboja.

Kita bisa melihat bukti globalisasi di dunia kita saat ini melalui pergerakan manusia di dalam perbatasan, lintas batas atau lintas benua, serta pergerakan barang dan jasa antar negara, khususnya pakaian dan barang elektronik dan pengalihan penanaman modal oleh perusahaan multinasional dan transnasional dari negara maju ke negara berkembang. Seperti yang bisa kita lihat, globalisasi dan pariwisata cenderung saling terkait, begitu pula “Rakyat” dan “Kesejahteraan” di NSP Korea. Di satu sisi, globalisasi dapat mengarah pada perkembangan sektor pariwisata dengan pergerakan bebas hampir semua hal; Di sisi lain, pariwisata dapat berkembang dan mendorong pergerakan globalisasi.

PENUTUP

Kesimpulannya, Kamboja sebagai salah satu negara CLMV dipandang sebagai negara yang paling tidak berkembang di antara negara lain tersebut. Jika NSP Korea Berhasil, pasti akan membantu Kamboja menjadi negara ekonomi kelas menengah bahkan lebih cepat dari yang seharusnya. Melalui NSP pula, Kamboja akan memperoleh keuntungan ekonomi dari pariwisata dan globalisasi. Hal perkembangan dan pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan SDG's goal 8 tentang economic growth, yang nyatanya dalam hal ini Kamboja dapat meningkatkan perekonomiannya dengan tourism dan juga mempercepat alur globalisasi.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik: Efektivitas Kerja Sama Negara Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Menghadapi Pemanasan Global

Rudi Pangidoan

ABSTRAK

Pemanasan global yang terjadi di abad ke-21 akan menggunakan metode penelitian kualitatif di akibat aktivitas manusia telah membawa dampak negatif yang mengancam bagi keberlangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Beberapa bencana alam akibat pemanasan global seperti semakin tingginya permukaan air laut telah terjadi di hampir seluruh belahan dunia yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang berdampak baik bagi masyarakat sipil maupun negara. Akibatnya hampir seluruh negara-negara terus berbondong-bondong melakukan program kerja sama dalam menangani pemanasan global yang dari tahun ke tahun semakin parah.

Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan anggota organisasi internasional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) juga tidak luput bekerja keras bersama-sama untuk mengurangi pemanasan global maupun dampak yang terjadi di dalamnya. Sejalan dengan hal ini, maka penulis hendak melihat bagaimana keefektivitasan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi dampak pemanasan global yang semakin membahayakan. Dalam hal ini, penulis

akan menggunakan metode penelitian kualitatif di mana hasil yang di dapatkan dari kumpulan data-data yang akan di analisis sehingga penulisan akan bersifat deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan teori liberalisme dengan spesifikasi liberalisme institusional dan konsep keamanan manusia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dapat berjalan dengan baik dan sukses dalam menghadapi dan menanggulangi dampak dari pemanasan global.

Kata Kunci: Efektivitas, Kerja Sama Internasional, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Pemanasan Global

ABSTRACT

Global warming that occurs in the 21st century due to human activities has a negative impact that threatens the survival of humankind itself. Several natural disasters due to global warming such as rising sea levels have occurred in almost all parts of the world, resulting in damage and losses that impact both civil society and the state.

As a result, nearly all countries continue to flock to collaborate programs in response to global warming, which is getting worse from year to year. Countries in the Southeast Asia region that are members of the international organization Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) also work hard to reduce global warming and its impacts. In line with this, the author wants to see how the effectiveness of the cooperation that has been carried out by ASEAN countries in facing the increasingly dangerous effects of global warming. In this case, the writer will use a qualitative research method where the results obtained from the data set will be analyzed to be descriptive. The discussion in this study will use the theory of liberalism with the specifications of institutional liberalism and human security. The conclusion that can be drawn is that the cooperation of ASEAN members can run well and be successful in facing and overcoming the effects of global warming.

Keywords: Effectiveness, International Cooperation, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Global Warming

PENDAHULUAN

Semenjak semakin dinamisnya kehidupan manusia di era kontemporer ini, banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi melalui aktivitas ekonomi sebagai upaya untuk dapat bertahan hidup. Namun aktivitas ekonomi kerap kali hanya memikirkan untung dan rugi, tetapi tidak memikirkan secara keseluruhan dari dampak negatif apa saja yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Ak-

tivitas ekonomi secara tidak langsung menjadikan manusia serakah dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Salah satu aktivitas untuk mencapai kepentingan ekonomi yang dapat merusak alam adalah penebangan pohon dan pembakaran kawasan hutan untuk di gunakan sebagai tempat perindustrian baru.

Berkaca dari pemberitaan media, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami kerusakan hutan akibat pembakaran. Dari Januari hingga Agustus 2019 tercatat bahwa luas hutan Indonesia yang terbakar seluas 328.724 hektar (BBC, 2019). Hingga akhir tahun 2019, data menyatakan bahwa wilayah hutan yang terbakar semakin melebar hingga mencapai 942.000 hektar dan ini menjadi rekor terparah jika di sandingkan dengan kebakaran dahsyat yang terjadi pada tahun 2015 di Indonesia (Al Jaera, 2019). Asap dan gas beracun seperti CO₂ yang merupakan hasil dari pembakaran hutan berdampak pada pemanasan global akibat meningkatnya gas rumah kaca ke atmosfer sehingga menghalangi keluarnya cahaya dan panas dari matahari yang masuk ke bumi. Akibat dari pemanasan global, maka terdapat beberapa kerusakan lain seperti perubahan cuaca yang ekstrim, meningkatnya permukaan air laut, merusak hasil pertanian dan perkebunan, hingga mengganggu dan merusak kesehatan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan.

Senada dengan pernyataan di atas, negara-negara mulai memandang ke depan tentang bagaimana solusi yang mampu di terapkan sebagai upaya mengatasi dan menekan dampak negatif dari

-pemanasan global yang terjadi. Negara-negara mulai bersama-sama merundingkan solusi dan kebijakan apa saja yang tepat serta bagaimana untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Hal yang sama juga terjadi bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang tergabung di dalam organisasi internasional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Sejalan dengan latar belakang yang telah di jelaskan, maka dalam penelitian ini, terdapat satu rumusan masalah yang akan di bahas oleh Penulis, yaitu bagaimana efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi internasional ASEAN dalam menghadapi pemanasan global akibat perubahan iklim?

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Tujuan tersebut dikategorikan menjadi:

- Secara umum penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan dan dampak yang di timbulkan oleh pemanasan global.
- Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi secara rinci dari peran ASEAN dan kerja sama yang di lakukan dalam menghadapi perubahan alam akibat pemanasan global.

Sebagai upaya untuk dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang akan Penulis gunakan se-

bagai bahan evaluasi dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, Penulis akan membaginya menjadi empat pengelompokan. Kelompok pertama mengenai karya tulis ilmiah yang membahas mengenai pemPada kelompok pertama, penulis akan menggunakan dua karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang pertama berjudul "Pemanasan Global" yang di tulis oleh Vivi Triana, dan di terbitkan oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas di tahun 2008. Dalam penulisannya karya tulis ilmiah tersebut, di jelaskan secara jelas mengenai pemanasan global di mulai dari definisi, penyebab, dampak, hingga penjelasan mengenai bagaimana dunia dan Indonesia menyikapinya.

Namun karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa kekurangan seperti tidak terdapatnya rumusan masalah, tidak menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, sangat minimnya penulisan sitasi baik dalam bentuk catatan kaki maupun catatan tubuh, dan tidak di temukannya daftar pustaka di bagian akhir karya ilmiah. Karya tulis ilmiah kedua berjudul "Pengaruh Pemanasan Global (Global Warming) terhadap Lingkungan dan Kesehatan" yang di tulis oleh Ratna Idayati, dan di terbitkan oleh Jurnal Kedokteran Syiah Kuala di tahun 2007. Dalam penulisannya karya tulis ilmiah tersebut juga sudah menjelaskan dengan baik mengenai definisi, penyebab, dampak, dan upaya pengendalian terhadap pemanasan global. Namun karya tulis ilmiah kedua ini masih memiliki kekurangan yaitu tidak menuliskan rumusan masalah yang di bahas dalam penulisannya.

Pada kelompok kedua, Penulis akan

-menggunakan satu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang akan di gunakan di tulis oleh Miranda Traeger dan di terbitkan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada pada tahun 2018. Dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “Mitigasi Perubahan Iklim di ASEAN: Dapatkah Solusi Ditemukan dalam Game Theory Model?”, Traegar mencoba menjelaskan penanganan dalam pemanasan global dengan menggunakan teori permainan Dilema Tahanan. Dalam penulisannya, Traegar memulai dari penjelasan di balik terjadinya pemanasan global menggunakan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang kemudian di lanjutkan terkait dengan pembahasan perubahan iklim yang terjadi di ASEAN. Namun dalam karya tulis ilmiah tersebut, Traegar belum menjelaskan kepada pembaca terkait bagaimana kondisi lapangan yang terjadi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara akibat perubahan iklim.

Pada kelompok ketiga, Penulis akan menggunakan dua karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah pertama di tulis oleh M. Basarah dengan judul “Prospek Kerja Sama Negara-negara ASEAN dalam pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas” yang terbit di Jurnal Hukum UII pada tahun 2000. Dalam penulisannya, Basarah menjelaskan penyebab umum pencemaran udara, perkembangan pencemaran udara di negara-negara berkembang, hingga prospek kerja sama sesuai dengan judul yang ada. Secara garis besar, karya tulis ilmiah ini juga sudah menjelaskan terkait kerangka hukum apa saja yang dapat di gunakan ketika membahas mengenai kerja sama dan pencemaran. Namun pada karya ilmiah ini, penulis belum mampu menggam-

barkan kepada pembaca terkait kondisi kerusakan akibat pencemaran udara serta implikasinya terhadap pemanasan global di ASEAN serta aspek kehidupan apa saja yang terganggu di dalamnya. Selain itu, abstrak yang ada belum mampu menggambarkan kepada pembaca secara jelas terkait dengan pembahasan yang ada di dalam karya tulis ilmiah ini.

Karya tulis ilmiah kedua dalam kelompok ketiga, Penulis akan menggunakan karya tulis ilmiah yang berjudul “Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas dalam Perspektif Perjanjian Internasional” yang di tulis oleh Suparto Wijoyo dan terbit di Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2012. Dalam karya tulis ilmiah ini, Wijoyo menjelaskan dengan lengkap perihal hukum internasional apa saja yang di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengendalian pencemaran udara. Wijoyo menjelaskan satu per satu hukum internasional, seperti Vienna Convention (1985), Montreal Protocol (1987, 1990, dan 1992), The Hague Declaration (1989), The Noordwijk Declaration (1989), UN-FCCC (1992), dan Kyoto Protocol (1997). Kekurangan dalam penulisan ini, Wiyoto belum menjelaskan kepada penulis terkait bagaimana perkembangan kondisi pencemaran udara baik secara umum maupun khusus dengan menggunakan data-data yang ada.

Selanjutnya pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode ini tidak membutuhkan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Cara kerja dari metode ini adalah berusaha untuk dapat menyimpulkan suatu makna dari kumpulan data yang ada, di mana makna tersebut juga merupakan hasil dari perspektif penulis itu sendiri. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif biasanya juga memiliki berbagai ciri seperti sifatnya penulisannya yang sangat deskriptif, mementingkan data langsung, dan lain-lain.

Jika membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara yang tergabung di dalam organisasi internasional, maka teori yang tepat untuk di gunakan adalah liberalisme institusional. Teori liberalisme ini memandang bahwa dengan semangat institusional, maka perdamaian akan dengan mudah di capai. Liberalisme institusional melalui pendekatan rasional institusionalis memandang bahwa dengan pendirian organisasi internasional, maka negara-negara akan mendapatkan manfaat seperti penyediaan akses informasi yang semakin mudah, mempermudah akses ekonomi perdagangan dan mengurangi biaya transaksi, dan lain sebagainya. Sehingga fungsi-fungsi yang ada di organisasi internasional dapat membawa organisasi internasional itu sendiri menjadi sebuah agen yang dapat mempengaruhi kepentingan, pemahaman intersubjektif, dan lingkungan negara (Abbott dan Snidal, 1998).

Kemudian, jika membahas mengenai dampak pemanasan global, maka konsep human security dengan dimensi keamanan lingkungan adalah hal tepat untuk dapat di gunakan. Hal ini sejalan dengan konsep human security di mana menurut United Nations Development Programme (UNDP)

di tahun 1994 di bagi menjadi tujuh kategori, yang terdiri dari keamanan ekonomi, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Lebih lanjut, keamanan lingkungan di bentuk dengan tujuan untuk dapat melindungi dan menjaga individu maupun masyarakat dari kerusakan alam baik yang di sengaja akibat ulah manusia maupun bencana alam yang tidak di sengaja, dalam rentan waktu singkat hingga rentan waktu panjang (Zulkiflar, 2013; 5).

ANALISIS

Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, penggambaran kerusakan kondisi alam akibat pemanasan global di Asia Tenggara akan di jelaskan untuk dapat memahami apa sebenarnya yang terjadi. Berdasarkan laporan yang ada, setiap tahunnya permukaan air laut naik setinggi satu hingga tiga milimeter di kawasan perairan Asia Tenggara. Menurut perhitungan, maka kenaikan air laut akan mencapai 70 sentimeter pada tahun 2100, sehingga akan mengancam terjadinya banjir dan beberapa pulau di kawasan Asia Tenggara tenggelam. Ini merupakan kondisi yang sangat berbahaya, mengingat bahwa kawasan Asia Tenggara mayoritas merupakan kawasan pesisir dan hampir 80% populasi manusia di Asia Tenggara hidup tidak jauh dari 100 km dari pesisir (Pasuhuk, DW, 2009).

Sejalan dengan perubahan iklim dan pemanasan global, maka banyak aspek kehidupan baik di tingkat individu maupun masyarakat yang terganggu. Dalam kasus ASEAN, perubahan iklim

sangat mempengaruhi terlebih dalam aspek ekonomi dan pertanian. Dalam perekonomian, akibat perubahan iklim dan pemanasan global, maka negara-negara di Asia Tenggara harus memikul biaya yang cukup besar dalam menghadapi permasalahan ini. Ini merupakan hasil penjelasan salah satu pakar iklim ADB yang bernama David McCauley, di mana dia melihat bahwa biaya yang akan keluar sebesar enam hingga tujuh persen dari total produk bruto domestic kawasan Asia Tenggara dan akan semakin membengkak dan bergerak dinamis (Pasuhuk, DW, 2009).

Akibatnya, perubahan iklim dan pemanasan global memainkan perang yang cukup signifikan dalam pola hubungan yang di lakukan oleh tiap-tiap negara. Tidak hanya itu, organisasi internasional juga memiliki ambil alih dalam membantu negara-negara dan menjadi wadah yang tepat untuk dapat berunding dan berdiplomasi. Kerja sama merupakan jalan keluar mengingat bahwa pemanasan global bukan hanya masalah yang terjadi di satu negara, dan tidak dapat berjalan dengan baik jika hanya di lakukan negara secara mandiri. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi internasional yang mewadahi kerja sama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara hadir.

Pada menghadapi perubahan iklim dan/atau pemanasan global yang terjadi, maka ASEAN membentuk beberapa program kerja sama di dalamnya. Langkah pertama yang di lakukan oleh ASEAN sebelum memulai kerja sama adalah dengan memanggil para pemimpin ASEAN untuk dapat mengeluarkan deklarasi atau pernyataan terkait pe-

rubahan iklim yang di mulai pada tahun 2007, 2009, 2010, 2011, dan 2014. Hal ini di maksudkan untuk dapat menyamakan pemahaman dan posisi serta aspirasi tiap-tiap negara dalam mencapai komunitas ASEAN yang tangguh di tengah perubahan iklim yang terjadi. Dengan ini juga di harapkan bahwa ASEAN dapat menjadi acuan bagi global perihal solusi yang tepat.

ASEAN sebelum memulai kerja sama juga melaksanakan beberapa kepentingan terkait hukum sebagai dasar landasan. ASEAN memanggil beberapa pihak untuk dapat bekerja secara efektif perihal pengadopsian protokol, instrumen, dan hukum internasional sebagai upaya untuk dapat memperkuat hukum perihal perlindungan dan penanganan pemanasan global. ASEAN juga menghimbau negara-negara untuk segera meratifikasi Amandemen Doha pada periode komitmen kedua dari Protokol Tokyo tahun 1997. Dengan ini, maka ASEAN akan memulai kerja sama melalui berbagai program.

Kerja sama ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim dapat di lihat dari ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint pada tahun 2009-2015 di Section D10. Dalam dokumen tersebut, di jelaskan bahwa tujuan strategis yang akan di capai oleh ASEAN adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak regional dan internasional untuk dapat mengatasi masalah perubahan iklim dan dampaknya terhadap pembangunan sosial ekonomi, kesehatan dan lingkungan, di negara anggota ASEAN. Dalam menempuh hal tersebut, maka ASEAN bertindak melalui penerapan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi, berdasarkan prinsip

keadilan, fleksibilitas, efektivitas, tanggung jawab umum tetapi berbeda, kemampuan masing-masing, serta merefleksikan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda (AASC, 2015).

Kemudian, ASEAN juga melaksanakan kerja sama melalui berbagai tindakan yang mengikutsertakan masyarakat internasional dan badan penting terkait lainnya. Beberapa tindakan yang ada seperti ASEAN mendorong komunitas internasional untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada upaya ASEAN dalam aforestasi dan reforestasi, serta untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian, ASEAN juga mendorong kesadaran dan advokasi publik untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi kesehatan manusia dari potensi dampak perubahan iklim. Hal ini juga terus di dukung dengan upaya ASEAN untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengatasi dampak perubahan iklim (Environment Division of the ASEAN Secretariat, 2020).

Tidak hanya itu, ASEAN juga memiliki beberapa program kerja yang telah selesai di laksanakan sebagai upaya terhadap penekanan perubahan iklim dan/atau pemanasan global. Program kerja tersebut meliputi berbagai format, seperti proyek regional, lokakarya, forum dan/atau pertemuan. Dalam proyek, ASEAN telah melaksanakan kegiatan yang bertajuk “Rehabilitasi dan Pemanfaatan Hutan Lahan Gambut yang Berkelanjutan di Asia Tenggara”. Proyek ini telah berjalan di tahun 2009 dan telah selesai di tahun 2013. Proyek ini me-

lakukan biaya sebesar US \$ 15 juta dan sesuai namanya, bertujuan untuk mencegah kebakaran lahan gambut sebagai sumber utama kabut asap. Proyek yang hampir sama dengan nama “Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim” juga di laksanakan oleh ASEAN dengan Jerman, di mana dana sebesar dua setengah juta Euro di gunakan untuk membantu ASEAN dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi instrument di bidang keanekaragaman hayati dan perubahan iklim (Environment Division of the ASEAN Secretariat, 2020).

Dalam format lokakarya, ASEAN telah melaksanakan beberapa seperti Lokakarya dan Pertukaran Kota Tangguh Iklim pada 18 hingga 19 Januari 2010 di Jakarta, Lokakarya tentang Risiko dan Dampak dari Kejadian Ekstrim Banjir pada 9 hingga 10 Juni 2010 di Indonesia, dan Lokakarya tentang Risiko dan Dampak dari Kejadian Ekstrim Kekeringan pada 2 hingga 23 September 2010 di Thailand. Selanjutnya dalam format forum dengan target anak muda, ASEAN telah melaksanakan Forum Lingkungan Pemuda ASEAN Plus Tiga: Menciptakan Iklim untuk Perubahan yang di selenggarakan pada 22 hingga 25 April 2010 di Brunei Darussalam. Forum ini di bentuk sebagai bagian dari pengimplementasian ASEAN Environmental Education Plan (AEEAP) 2008-2012 dengan tujuan di dalamnya untuk dapat membangkitkan minat dan kesadaran pemuda dari negara-negara ASEAN dan Plus Three tentang isu-isu perubahan iklim. Forum ini kemudian di tutup dengan dokumen yang bernama Statement on ASEAN Plus Three Youth Actions on Environment, yang antara lain menguraikan janji dan resolusi anak muda untuk berperan dalam

menjaga lingkungan (Environment Division of the ASEAN Secretariat, 2020).

Jika dianalisis menggunakan teori liberalisme institusional, maka penulis melihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung di dalam organisasi internasional ASEAN dapat berjalan dengan baik. Ini disebabkan karena negara-negara di ASEAN yang menjalin kerja sama saling memperoleh keuntungan bagi tiap-tiap negara. Jika tiap-tiap negara mendapatkan keuntungannya melalui organisasi internasional, maka sejalan dengan itu peran aktif negara juga akan semakin meningkat dan akan semakin mengkonstruksikan organisasi. Kemudian melalui pendekatan rasional institusionalis, maka organisasi internasional ASEAN berguna untuk melegitimasi praktik maupun ide tertentu, meningkatkan kapasitas dan kekuatan negara, dan dapat membawa serta mendukung aktivitas-aktivitas spesifik yang di mana dalam konteks ini adalah bidang pencegahan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan/atau pemanasan global. melegitimasi praktik maupun ide tertentu, hingga meningkatkan kapasitas dan kekuatan negara.

Kemudian jika di analisis menggunakan konsep human security maka ASEAN tepat dalam mengupayakan kerja sama untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini juga sebagai upaya ASEAN dalam menciptakan tempat tinggal makhluk hidup yang tetap lestari. Penulis juga menemukan bahwa kerja sama ASEAN juga berdampak positif kepada dimensi keamanan lainnya di luar dimensi keamanan lingkungan, sep-

erti keamanan ekonomi dan jaminan kesehatan.

PENUTUP

Perubahan iklim yang terjadi akibat aktivitas ekonomi membawa dampak besarnya kepada kerusakan alam. Kebakaran hutan salah satunya sebagai langkah pembukaan lahan industri baru menyumbangkan potensinya terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki luas hutan terbesar, malah menjadi penyumbang terbesar kebakaran hutan yang berada di kawasan. Akibat dari pemanasan global, salah satu bencana banjir dan tenggelamnya pulau-pulau di kawasan Asia Tenggara merupakan bencana yang mungkin akan di hadapi oleh Asia Tenggara. Kerugian ekonomi akibat biaya penanganan semakin membesar setiap tahunnya.

Untuk itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung di dalam organisasi internasional melaksanakan dan meningkatkan intensitasnya terhadap kerja sama. ASEAN menurut Penulis cukup tepat di mana sebelum memulai kerja sama dalam bidang ini, mengundang para pemimpin negara dan tokoh penting lainnya untuk dapat mematuhi hukum internasional yang berlaku. Program-program kerja sama ASEAN juga sudah meliputi beberapa bidang mulai dari kerja sama dengan institusi maupun negara lain di luar Asia Tenggara, pelaksanaan lokakarya yang dilakukan di beberapa negara berbeda, hingga mengundang masyarakat terlebih anak muda untuk sekiranya peduli dengan apa yang sebenarnya kerusakan alam yang sedang ter-

jadi. Sebagai akhir dari penulisan, Penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan kerja sama perihal menghadapi pemanasan global. Pertama, Penulis menyarankan untuk setiap kepala pemerintahan negara atau petinggi-petinggi penting lainnya untuk dapat meregulasi ulang hukum yang dapat merusak lingkungan, serta melakukan penindakan tegas terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang merusak lingkungan. Kedua, ASEAN harus meningkatkan relasi dan mengajak lebih banyak negara untuk dapat bersama-sama bekerja sama dengan ASEAN dalam hal ini. Ketiga, ASEAN harus lebih banyak mengkampanyekan aksi tanggung jawab dan cinta lingkungan baik bagi inividu, masyarakat, perusahaan, dan aktor lainnya yang berkaitan.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Diskursus Pemberdayaan Energi Alternatif

Mikhail Adam

ABSTRAK

Pembangunan Asia Pasifik ditantang untuk menjawab kebutuhan ekonomi politik, untuk saat ini dan menjaga kelangsungan hidup dari bencana ekologis. Pembangunan yang tak mengandung keadilan lingkungan menjadi pekerjaan serius untuk diatasi. deforestasi yang semakin meluas, kebutuhan air bersih yang semakin menipis, ketersediaan lahan untuk persawahan dan masyarakat adat menjadi potret di beberapa wilayah Asia Pasifik, khususnya ASEAN. Logika pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi kembali dipertanyakan, untuk mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di Asia Pasifik. Model pembangunan hijau mulai hidup, di tengah kerusakan hutan dan alam yang terkoyak di bumi Asia Pasifik.

Diskursus mengenai pembangunan berkelanjutan yang tepat guna, disaat mainstream ketergantungan ekonomi Negara-negara dunia menjadi, salah satu yang harus dijawab Negara-negara Asia pasifik yang kaya akan sumber daya alam. untuk menemukan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat menopang pembangunan yang memanusiakan manusia dan pemberdayaan energy alternatif

dan terbarukan untuk mencegah kiamat ekologis. Korea selatan mencetuskan green economy new deal untuk mengatasi krisis iklim.

Kata Kunci: Pembangunan berkelanjutan, Pemberdayaan Energi Alternatif, ASEAN

ABSTRACT

The development of Asia Pacific is challenged to answer the needs of the political economy, for now, and to protect the survival of ecological disasters. Then, the development that does not contain environmental justice is serious work to be tackled. The issue of deforestation, dwindling need for clean water, the availability of land for rice fields, and indigenous peoples are portraits in several Asia Pacific regions, especially ASEAN. The logic of development, which only pursues economic growth, is being questioned again, to bring prosperity and prosperity to the people of Asia Pacific. The green development model is coming to true, amidst the destruction of forests and nature, which is being torn apart in the Asia Pacific region.

The discourse on appropriate sustainable development, when the economic dependence of the world's countries is mainstream, is one that must be answered by the Asian Pacific countries that are rich in natural resources, to find technology that is environmentally friendly and can support humanizing development and the empowerment of alternative and renewable energy to prevent an ecological apocalypse

Keywords: Sustainable development, Alternative Energy Empowerment, ASEAN

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi diskursus menarik di Asia pasifik. Disatu sisi melihat dari kondisi di Asia Pasifik yang telah banyak kerusakan alam untuk pembangunan negeri-negeri di Eropa, yang sesegera mungkin diatasi namun dari sisi hukum dan logika ekonomi hal itu sulit direalisasikan. Namun di depan mata krisis iklim dan bencana ekologi menjadi ancaman serius negara-negara di Asia Pasifik bahkan tanggung jawab dunia internasional untuk keberlangsungan hidup. Pembangunan yang memanusiakan manusia dan bersandar pada keadilan lingkungan menjadi perhatian khusus model pembangunan di Asia. Pembangunan berkelanjutan mesti dicanangkan dan dilaksanakan secara serius demi kelangsungan bersama. Seruan mengenai industri sawit hijau, pengelolaan limbah tambang yang baik telah di contohkan Freeport, Korea selatan yang menggeliat dengan green ekonominya menjadi angin segar untuk mengatasi krisis iklim dan juga ketimpangan yang menukik di

Asia Selatan.

Energi alternatif telah diterapkan dalam skala-skala kecil untuk pengelolaan sampah, barang bekas menjadi energi yang bisa digunakan kembali untuk mengurangi pencemaran lingkungan, telah bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan mulai diterapkan meski seringkali berbenturan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi ala logika kapital. Sejak tahun 1950-an industri pertambangan disinyalir akan menimbulkan daya rusak yang luar biasa namun hal ini diabaikan demi profit dan menyambung nyawa para kapitalis global atau kaum globalis.

Saat ini, pandemi Covid-19 menghadirkan kontradiksi mengenai sekedar keuntungan ekonomi, Covid-19 dengan gamblang menunjukkan perlunya menjaga keadilan lingkungan untuk menghindari kemusnahan dengan pembangunan berkelanjutan yang bersandar pada kemanusiaan dan keadilan lingkungan. Model-model pembangunan hijau telah diserukan dan bersahut-sahutan di belahan dunia dan lingkup Asia Pasifik, Korea yang datang membawa Green Economy, rakyat Filipina yang menyerukan ekologi sosialismenya, Pegiat lingkungan di wilayah lainnya yang sedang gencar mengkampanyekan untuk diterapkan secara baik dan benar pembangunan berkelanjutan.

Kemudian, penulis mendahulukan aspek historis bangsa Asia, wilayah Asia yang mayoritas adalah negara jajahan memiliki karut sengkabut sebagai bekas negara jajahan. Kekayaan alam Asia, ternyata tak di barengi dengan penguasaan teknologi

yang memadai untuk negara Asia mengelola buminya sendiri dan cengkaman kapital membayangi negara-negara di Asia. Sejak zaman penjajahan hingga perang dingin usai, hasil bumi negara-negara Asia kurang dinikmati bangsa Asia, sebaliknya bangsa Eropalah dan Amerika Serikat sebagai pemenang perang, mengeruk dan menguras kekayaan bumi Asia untuk pembangunan negeri-negeri sarat modernitas yang diambil bahan-bahannya yang berkualitas super dari bumi Indonesia, negara-negara pasifik, Filipina, India, dan negara-negara Asia Pasifik lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk pembangunan di Eropa dan Amerika Serikat.

Struktur yang timpang ini menjadi rantai pengeskplotasian yang terus terjadi sampai saat ini, dengan menelurkan kesenjangan pembangunan yang tajam dan keterjajahan dalam ekonomi meski merdeka secara politik. Benang inilah yang mesti diurai satu per satu untuk melepaskan cengkaman bangsa Asia untuk berdikari secara ekonomi politik dan melaksanakan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di Asia atau negara-negara di Asia untuk kemakmuran rakyatnya. Dua contoh kasus yang berhasil sedikit demi sedikit keluar dari cengkaman kaum globalis telah berhasil dilakukan China dan disusul Vietnam. Sejak 1989, diruntuhkannya tembok Berlin, tang menandai kemenangan para kapitalis global yang menjadi sistem dunia. Membuat sistem kapitalis memenangkan rasionalitas umum dan dunia ada dalam mainstream itu, yakni pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran yang patut dipertanyakan kembali.

Tiap negara perlu investasi dan modal masuk kenegaranya dan untuk pembangunan di negaranya, namun hal jitu dilakukan China dan Vietnam. Umumnya negara yang masuk arus investasi dikuasai oleh pemodal atau dalam kata lain modal yang menguasai negara tersebut. Ini diputar balikkan oleh China dan Vietnam, modal yang masuk kenegaranya, merekalah yang menguasai modal tersebut, bukan sebaliknya. Alhasil perlahan mulai bangkit dan keluar dari cengkaman kapitalis global. Jepang dan Korea Selatan menunjukkan gejala-gejala kemiripan untuk berupaya keluar dari cengkaman dan plot kaum globalis. Notabene Jepang sebagai negara kalah perang tanpa syarat terkungkung oleh hegemoni negara yang mengalahkannya. Dengan China yang berhasil keluar dan bertumbuh menjadi negara adidaya menyediakan alternatif bagi negara-negara Asia untuk membuat pilihan kerja sama untuk pembangunan yang lebih menguntungkan bagi negaranya dan menjadi contoh untuk bangsa Asia keluar dari cengkaman kaum globalis

Konteks Pandemi yang dimanfaatkan China untuk menegaskan supremasinya membantu negara-negara di dunia dengan bantuan tenaga kesehatan, pelan-pelan mengeser hegemoni AS yang telah lama bercokol. Pandemi pulalah yang merubah tatanan sosial dan berpotensi mode pembangunan dan ekonomi politik. Pembangunan berkelanjutan yang secara langsung dikumandangkan Korea Selatan Green Economy New deal menjadi alternatif mode pembangunan dari industri ekstraktif yang memiliki konsekuensi jangka panjang mengerikan. Ekonomi hijau yang Korea lakukan bersandar pada

memaksimalkan potensi energi-energi alternatif di Kalimantan untuk perahunya. Limbah minyak yang ramah lingkungan dan energi terbarukan untuk menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial politik.

Kondisi di ASEAN terjadi perebutan pengaruh, mengingat bumi ASEAN kaya akan sumber daya alam dan memiliki tanah yang subur. Industri sawit yang massive di Malaysia dan Indonesia untuk kebutuhan sawit dunia, menjadi satu tantangan untuk merumuskan sawit hijau untuk peremajaan tanah untuk petani-petani kecil dan mengatasi deforestasi. Indonesia yang menghasilkan minyak sawit dalam jumlah besar, namun pasar di Eropa yang sedikit beralih dalam urusan otomotif dengan keluaran mobil listrik, mengurangi pasar ekspor sawit Indonesia, yang menimbulkan barang yang berlebih, ditambah sawit Indonesia yang dikenal merusak hutan dengan peristiwa Karhutla.

Kebutuhan sawit yang tinggi senantiasa dibarengi dengan pembabatan hutan untuk dialihfungsikan menjadi industri sawit, dan ini menimbulkan ancaman deforestasi dan ancaman bencana ekologis. Uni Eropa menginisiasi standar sawit yang ramah lingkungan meski belum benar-benar dilaksanakan. Pembangunan berkelanjutan mesti senantiasa di dorong dengan memaksimalkan kecanggihan teknologi yang berdasarkan pada kemanusiaan dan ramah lingkungan, energi alternatif yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sebagai contoh limbah minyak jelantah di Kalimantan lewat teknologi bisa kembali di olah menjadi biodiesel yang lebih murah dari bahan bakar umumnya, dan ini digunakan nelayan-nelayan

di Kalimantan untuk perahunya. Limbah minyak jelantah, memiliki potensi lain untuk dikelola menjadi pupuk tanaman, sabun, dan lilin.

Berkaca pada rata-rata konsumsi minyak goreng 5,2 juta ton per tahun di Indonesia. Dengan perkiraan susut 40 persen, ada sekitar 2-3 juta ton per tahun, tiap tahunnya. yang bisa diberdayakan kembali. Pemberdayaan ini bisa menghasilkan sabun cair, super pel, lilin aromatherapy dan biodiesel. Khususnya untuk bio diesel, mandatory pemerintah yang mengharuskan bahan bakar minyak (BBM) ada campuran biodiesel sebesar 30%. Jika hal ini serius dilakukan dan dikembangkan, maka ekonomi kalangan bawah, mendapat sokongan tambahan dari limbah minyak jelantah. Pemberdayaan energi dari minyak jelantah bukan hanya dari sisi ekonomi melainkan juga untuk kesehatan dan lingkungan tercatat limbah minyak jelantah jika tak diberdayakan berdampak memiecu kanker, stunting, keracunan makanan dan risiko penyakit kardiovaskular dari segi kesehatan dan menimbulkan bahaya lingkungan jika dibuang ke saluran akan menghambat selokan, merusak ekosistem perairan dan mencemari permukaan tanah.

Dari sisi ekonomi gotong royong di grassroots, dalam bingkai alternative regional atau ASEAN people forum, mengusung koperasi rakyat ASEAN, sebagai penguatan gerakan sosial dan pemberdayaan dikalangan akar rumput. System capital yang menciptakan kesenjangan yang sangat tajam di ASEAN, perlu ada counter hegemonic dari masyarakat. Ekonomi alternative dari kalangan rakyat ASEAN, bisa meciptakan rantai kerja sama di berbagai

Negara di ASEAN. Semisal jika Negara-negara ASEAN perlu baju atau bahan, bisa membeli dari organisasi rakyat Thailand, jika perlu tembakau bisa membelinya dari koperasi rakyat di Indonesia, dan jika perlu beras kita bisa membeli dari asosiasi petani Vietnam. Ini bisa merajut solidaritas sesama rakyat ASEAN untuk membangun dan memperkuat kapasitas masyarakat ASEAN.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi diskursus menarik di Asia Pasifik. Disatu sisi melihat dari kondisi di Asia Pasifik yang telah banyak kerusakan alam untuk pembangunan negeri-negeri di Eropa, yang sesegera mungkin diatasi namun dari sisi hukum dan logika ekonomi hal itu sulit direalisasikan. Namun di depan mata krisis iklim dan bencana ekologi menjadi ancaman serius negara-negara di Asia Pasifik bahkan tanggung jawab dunia internasional untuk keberlangsungan hidup. Pembangunan yang memanusiakan manusia dan bersandar pada keadilan lingkungan menjadi perhatian khusus model pembangunan di Asia. Pembangunan berkelanjutan mesti dicanangkan dan dilaksanakan secara serius demi kelangsungan bersama. Seruan mengenai industry sawit hijau, pengelolaan limbah tambang yang baik telah di contohkan Freeport, Korea selatan yang menggeliat dengan green ekonomi-nya menjadi angin segar untuk mengatasi krisis iklim dan juga ketimpangan yang menukik di Asia Selatan.

Energi alternatif telah diterapkan dalam skala-skala kecil untuk pengelolaan sampah, barang

bekas menjadi energi yang bisa digunakan kembali untuk mengurangi pencemaran lingkungan, telah bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan mulai diterapkan meski seringkali berbenturan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi ala logika kapital. Sejak tahun 1950-an industri pertambangan disinyalir akan menimbulkan daya rusak yang luar biasa namun hal ini diabaikan demi profit dan menyambung nyawa para kapitalis global atau kaum globalis. Saat ini, pandemi Covid-19 menghadirkan kontradiksi mengenai sekedar keuntungan ekonomi, Covid-19 dengan gamblang menunjukkan perlunya menjaga keadilan lingkungan untuk menghindari kemusnahan dengan pembangunan berkelanjutan yang bersandar pada kemanusiaan dan keadilan lingkungan.

Model-model pembangunan hijau telah diserukan dan bersahut-sahutan di belahan dunia dan lingkup Asia Pasifik, Korea yang datang membawa *Green Economy*, rakyat Filipina yang menyerukan ekologi sosialismenya, Pegiat lingkungan di wilayah lainnya yang sedang gencar mengkampanyekan untuk diterapkan secara baik dan benar pembangunan berkelanjutan. Kemudian, penulis mendahulukan aspek historis bangsa Asia, wilayah Asia yang mayoritas adalah negara jajahan memiliki karut sengkabut sebagai bekas negara jajahan. Kekayaan alam Asia, ternyata tak di barengi dengan penguasaan teknologi yang memadai untuk negara Asia mengelola buminya sendiri dan cengkraman kapital membayangi negara-negara di Asia.

Sejak zaman penjajahan hingga perang dingin usai, hasil bumi negara-negara Asia kurang dinikmati bangsa Asia, sebaliknya bangsa Eropa dan Amerika Serikat sebagai pemenang perang, mengeruk dan menguras kekayaan bumi Asia untuk pembangunan negeri-negeri sarat modernitas yang diambil bahan-bahannya yang berkualitas super dari bumi Indonesia, negara-negara pasifik, Filipina, India, dan negara-negara Asia Pasifik lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk pembangunan di Eropa dan Amerika Serikat. Struktur yang timpang ini menjadi rantai pengeskplotasian yang terus terjadi sampai saat ini, dengan menelurkan kesenjangan pembangunan yang tajam dan keterjajahan dalam ekonomi meski merdeka secara politik. Benang inilah yang mesti diurai satu per satu untuk melepaskan cengkraman bangsa Asia untuk berdikari secara ekonomi politik dan melaksanakan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di Asia atau negara-negara di Asia untuk kemakmuran rakyatnya.

Dua contoh kasus yang berhasil sedikit demi sedikit keluar dari cengkraman kaum globalis telah berhasil dilakukan China dan disusul Vietnam. Sejak 1989, diruntuhkannya tembok Berlin, yang menandai kemenangan para kapitalis global yang menjadi sistem dunia. Membuat sistem kapitalis memenangkan rasionalitas umum dan dunia ada dalam mainstream itu, yakni pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran yang patut dipertanyakan kembali. Tiap negara perlu investasi dan modal masuk ke negaranya dan untuk pembangunan di negaranya, namun hal itu dilakukan China dan Vietnam. Umumnya negara

yang masuk arus investasi dikuasai oleh pemodal atau dalam kata lain modal yang menguasai negara tersebut. Ini diputar balikkan oleh China dan Vietnam, modal yang masuk ke negaranya, merekalah yang menguasai modal tersebut, bukan sebaliknya. Alhasil perlahan mulai bangkit dan keluar dari cengkraman kapitalis global. Jepang dan Korea Selatan menunjukkan gejala-gejala kemiripan untuk berupaya keluar dari cengkraman dan plot kaum globalis. Notabene Jepang sebagai negara kalah perang tanpa syarat terkungkung oleh hegemoni negara yang mengalahkannya.

Dengan China yang berhasil keluar dan bertumbuh menjadi negara adidaya menyediakan alternatif bagi negara-negara Asia untuk membuat pilihan kerja sama untuk pembangunan yang lebih menguntungkan bagi negaranya dan menjadi contoh untuk bangsa Asia keluar dari cengkraman kaum globalis. Konteks pandemi yang dimanfaatkan China untuk menegaskan supremasinya membantu negara-negara di dunia dengan bantuan tenaga kesehatan, pelan-pelan mengeser hegemoni AS yang telah lama bercokol. Pandemi pulalah yang merubah tatanan sosial dan berpotensi mode pembangunan dan ekonomi politik. Pembangunan berkelanjutan yang secara langsung dikumandangkan Korea Selatan Green Economy New deal menjadi alternatif mode pembangunan dari industri ekstraktif yang memiliki konsekuensi jangka panjang mengerikan. Ekonomi hijau yang Korea lakukan bersandar pada memaksimalkan potensi energi-energi alternatif yang ramah lingkungan dan energi terbarukan untuk menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial politik.

Kondisi di ASEAN terjadi perebutan pengaruh, mengingat bumi ASEAN kaya akan sumber daya alam dan memiliki tanah yang subur. Industri sawit yang massive di Malaysia dan Indonesia untuk kebutuhan sawit dunia, menjadi satu tantangan untuk merumuskan sawit hijau untuk peremajaan tanah untuk petani-petani kecil dan mengatasi deforestasi. Indonesia yang menghasilkan minyak sawit dalam jumlah besar, namun pasar di Eropa yang sedikit beralih dalam urusan otomotif dengan keluaran mobil listrik, mengurangi pasar ekspor sawit Indonesia, yang menimbulkan barang yang berlebih, ditambah sawit Indonesia yang dikenal merusak hutan dengan peristiwa Karhutla.

Kebutuhan sawit yang tinggi senantiasa dibarengi dengan pembabatan hutan untuk dialih-fungsikan menjadi industri sawit, dan ini menimbulkan ancaman deforestasi dan ancaman bencana ekologis. Uni Eropa menginisiasi standar sawit yang ramah lingkungan meski belum benar-benar dilaksanakan. Pembangunan berkelanjutan mesti senantiasa di dorong dengan memaksimalkan kecanggihan teknologi yang berdasarkan pada kemanusiaan dan ramah lingkungan, energi alternatif yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sebagai contoh limbah minyak jelantah di Kalimantan lewat teknologi bisa kembali di olah menjadi biodiesel yang lebih murah dari bahan bakar umumnya, dan ini digunakan nelayan-nelayan di Kalimantan untuk perahunya. Limbah minyak jelantah, memiliki potensi lain untuk dikelola menjadi pupuk tanaman, sabun, dan lilin.

Berkaca pada rata-rata konsumsi minyak goreng 5,2 juta ton per tahun di Indonesia. Dengan perkiraan susut 40 persen, ada sekitar 2-3 juta ton per tahun, tiap tahunnya. yang bisa diberdayakan kembali. Pemberdayaan ini bisa menghasilkan sabun cair, super pel, lilin aromatherapy dan bio diesel. Khususnya unntuk bio diesel, mandatory pemerintah yang mengharuskan bahan bakar minyak (BBM) ada campuran biodiesel sebesar 30%. Jika hal ini serius dilakukan dan dikembangkan, maka ekonomi kalangan bawah, mendapat sokongan tambahan dari limbah minyak jelantah. Pemberdayaan energi dari minyak jelantah bukan hanya dari sisi ekonomi melainkan juga untuk kesehatan dan lingkungan tercatat limbah minyak jelantah jika tak diberdayakan berdampak memicu kanker, stunting, keracunan makanan dan risiko penyakit kardiovaskular dari segi kesehatan dan menimbulkan bahaya lingkungan jika dibuang ke saluran akan menghambat selokan, merusak ekosistem perairan dan mencemari permukaan tanah.

Dari sisi ekonomi gotong royong di grassroots, dalam bingkai alternative regional atau ASEAN people forum, mengusung koperasi rakyat ASEAN, sebagai penguatan gerakan sosial dan pemberdayaan dikalangan akar rumput. Sistem kapital yang menciptakan kesenjangan yang sangat tajam di ASEAN, perlu ada *counter hegemonic* dari masyarakat. Ekonomi alternative dari kalangan rakyat ASEAN, bisa meciptakan rantai kerja sama di berbagai Negara di ASEAN. Semisal jika negara-negara ASEAN perlu baju atau bahan, bisa membeli dari organisasi rakyat Thailand, jika perlu tembakau bisa membelinya dari koperasi rakyat di Indonesia,

dan jika perlu beras kita bisa membeli dari asosiasi petani Vietnam. Ini bisa merajut solidaritas sesama rakyat ASEAN untuk membangun dan memperkuat kapasitas masyarakat ASEAN.

PENUTUP

Pembangunan berkelanjutan bisa diisi juga oleh *civil society* dalam berskala kecil dengan pemanfaatan barang-barang bekas menjadi energi alternatif dan negara-negara di Asia Pasifik mesti gencar untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk menghindari kiamat ekologis dan untuk kebutuhan saat ini ekonomi politik tercukupi dengan ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga dengan ekonomi hijau. Pengembangan dan riset mesti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *survive* dan tuntutan perubahan yang akan selalu terjadi untuk menjawab konteks zaman dan juga harus berpandangan futuristik. Wadah persatuan menjadi penting untuk mengeluarkan dunia dari ancaman krisis ganda dari pandemi.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik pada Globalisasi

Hinggil Larasati

ABSTRAK

Dinamika Pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita dengar SDGs merupakan suatu program lanjutan dari MDGs yaitu *Millennium Development Goals* yang di sepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir tahun 2015. SDGs tercetus pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. SDGs mengakomodasikan pembangunan-pembangunan secara komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif dalam penyelesaian setiap tujuan dan sasarnya. SDGs melibatkan segala sector seperti, *Civil Society Organization*, sector swasta, akademisi, dan sebagainya. SDGs memiliki prinsip tidak meninggalkan satu orang pun (*leave no one behind*).

Pada era globalisasi SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara, negara maju, berkembang, maupun yang belum berkembang. SDGs juga memberikan ruang yang luas kepada *stakeholder* non pemerintah untuk terlibat dalam penyusunan agenda pembangunan. Melalui konsultasi antar *stakeholder* dan *my word survey*, yang dilakukan oleh PBB. Kemudian hasilnya dijadikan sebagai pertimbangan untuk 17 tujuan yang terdapat dalam SDGs.

Kata Kunci: SDGs, Globalisasi, Asia Pasifik, PBB, Konstruktivisme.

ABSTRACT

The dynamics of sustainable development or what we often hear about SDGs are a continuing program of the MDGs, namely the Millennium Development Goals that were agreed upon by UN member states in 2000 and ended in 2015. The SDGs framework was initiated in September 2015 in New York. The SDGs framework could accommodate growth comprehensively (both qualitatively and quantitatively) by improving development through the completion of each goal. SDGs involve all sectors such as Civil Society Organizations, the private sector, academics, and others. The SDGs have the principle of not leaving anyone behind.

In this era of globalization, SDGs are also universal in providing a balanced role to all countries, including developed, developing, and underdeveloped countries. The SDGs also provide ample space for non-government stakeholders to be involved in developing the development agendas. Through consultations between stakeholders and my word survey, con-

-conducted by the United Nations. Then the results are taken into consideration for the 17 objectives contained in the SDGs.

Keywords: SDGs, Globalization, Asia-Pacific, PBB, Constructivist.

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang di buat untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan ini dimulai pada tahun 1970-an, dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang di timbulkan oleh pembangunan industri yang dilakukan. Karena adanya masalah ini, maka diselenggarakannya konferensi Stockholm pada tahun 1972-an. Konferensi dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di fisik global (Asia dan Pasifik). Terdapat 3 dimensi dalam pembangunan berkelanjutan yaitu, (1) pembangunan ekonomi, yang memfokuskan kepada pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, (2) pembangunan sosial, mencakup pemberdayaan peran serta kebersamaan, mobilitas identitas, kebudayaan, pembinaan kelembagaan, dan pengentasan kemiskinan, dan (3) pembangunan ekologi (lingkungan hidup), bertujuan untuk integritas ekosistem, ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman hayati, dan tanggap isu global.

SDGs yang ditetapkan ole PBB terdiri dari 17 tujuan dan 169 target diantaranya, (1) Menghapus kemiskinan; (2) Mengakhiri kelaparan; (3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; (4) Pendidikan bermutu (berkualitas); (5) Kesetaraan gen-

der; (6) Akses air bersih dan sanitasi; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Infrastruktur, industry, dan inovasi; (10) Mengurangi ketimpangan; (11) Kota dan komunitas yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Menjaga ekosistem laut; (15) Menjaga ekosistem darat; (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sebagai contoh dari 17 tujuan yang di tetapkan pada tahun 2017, Indonesia berfokus pada 7 tujuan yaitu, (1) pengentasan segala bentuk kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik , (3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk, (4) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, (5) membangun infrasruktur yang tangguh,meningkatkan industry inklusif, dan berkelanjutan serta mendorong inovasi , (6) Ekosistem kelautan , (7) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk mencapai tujuan. Adapun kendala yang dihadapi seperti pendataan kependudukan. Prinsip-prinsip SDGs yaitu (1) manusia; (2) planet; (3) kemakmuran; (4) perdamaian; (5) Kerjasama.

Salah satu contoh dari tujuan SDGs yaitu kesetaraan gender, mengapa ada kesetaraan gender, itu dikarenakan masih banyaknya orang-orang yang memandang rendahnya status perempuan. Meningkatkan beban kerja dalam pertanian subsisten, dan perdagangan informal, serta berkurangnya hak-hak

tradisional perempuan di pedalaman, pendidikan dan pengambilan keputusan di lembaga-lembaga nasional dan badan pembuat kebijakan digunakan sebagai bukti untuk menggarisbawahi posisi perempuan yang semakin melemah. Ahli teori Marxis-feminis memandang rendahnya status perempuan sebagai akibat dari pembagian kerja seksual yang muncul sebagai ekspresi dari peran perempuan dalam aktivitas reproduktif, dan artikulasinya dengan produksi di luar rumah (Beneria dan Sen 1981; Nash 1981).

Mereka memperhatikan perempuan yang dipaksa oleh keadaan ekonomi untuk bekerja berjam-jam dengan upah yang sangat rendah, serta praktik yang semakin umum tentang perempuan yang bekerja 'hari ganda'. Dengan semakin majunya zaman saat ini banyak perkembangan yang terjadi dari segala segi, seperti ekonomi, politik, lingkungan, dan sebagainya. Dalam hal ini PBB telah memperbarui program mengenai pembangunan ini, jika dahulu bernama MDGs sekarang telah berganti menjadi SDGs. Tidak dipungkiri era saat ini yaitu globalisasi, diketahui bahwa banyak negara yang saling berlomba dalam meningkatkan kestabilan negaranya, Sebagai contoh Asia Pasifik. Maka dari itu. Bagaimana SDGs di Asia Pasifik dapat meningkatkan atau mempercepat Globalisasi?

ANALISIS

SDGs di tingkat nasional dan regional perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs sebagaimana yang telah di bangun dalam tingkat global. (Sekar Panuluh, 2016) Selain itu ada beberapa

contoh kegiatan yang telah dilakukan negara di Asia Pasifik yaitu, penyepakatan indikator SDGs di bawah dewan ECOSOC PBB, menindaklanjuti mandat, tugas, dan pelaporan UNESCAP di Kawasan regional Asia-Pasifik, dan High Level Political Forum (HLPF), sebagai lanjutan dari menindaklanjuti dan pelaporan pelaksanaan SDGs yang menghasilkan ministerial declaration. (Sekar Panuluh, 2016). Adapun cara yang dilakukan Asia Pasifik untuk mempercepat globalisasi yaitu meningkatkan infrastruktur, industri, dan inovasi, serta kemitraan untuk mencapai tujuan seperti memberdayakan kalangan swasta dan masyarakat madani, Kedua hal tersebut sudah tercantum dalam tujuan SDGs.

Selain itu juga melakukan tukar menukar informasi, dan pengalaman dalam meraih tujuan dari SDGs. Meningkatkan ekspor, menggalangkan system perdagangan multilateral universal. Seperti pada bulan September 2016, pemerintah mengandeng filantropi untuk berkomitmen dalam SDGs yang di tandai dengan penandatanganan Deklarasi dukungan kemitraan SDGs. Filantropi dibutuhkan karena keberhasilan SDGs akan bergantung pada kemitraan yang inklusif, sebagai sumber daya keuangan dan teknis. (Dr. Nurhayati Ali Assegaf, 2016). Lalu adapun strategi lain yang dibuat seperti mengarahkan upaya ADB agar efektif dalam menanggapi perubahan di kawasan ini, seperti mencapai komitmen global, mendorong pembangunan berkelanjutan melalui intervensi di sektor sosial dan infrastruktur, mendorong kerjasama dan integrasi kawasan. (Bank, 2018).

Saat ini dengan semakin majunya zaman SDGs meminta pemerintah dari negara-negara yang terlibat untuk mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu dengan penggunaan bahan efisien, dan dapat di daur ulang. (Sri Indah Wibinastiti (SIW), 2020). Kemudian adanya Green Economy (ekonomi hijau). Ekonomi hijau merupakan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. *Green economy* ini juga salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk dapat mempercepat globalisasi. Bagi negara berkembang investasi besar-besaran di sektor infrastruktur di tengah kurangnya fasilitas transportasi, air, energi, dan perumahan, memberikan peluang untuk mengubah cara pemakain energi dan sumber daya alam yang lebih efisien.

Dengan beralihnya ke sistem *green economy* mengubah negara-negara di wilayah Asia Pasifik bisa mengurangi kemiskinan pada saat yang sama melestarikan lingkungan. Sistem ekonomi hijau mengubah pertumbuhan ekonomi yang penuh polusi dan mengonsumsi sumber daya alam secara berlebihan ke sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk jangka Panjang. Semua strategis di atas sekaligus bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya dan dampak negative perubahan iklim. Metode yang tepat dalam mengkaji SDGs ini ialah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori yang perspektifnya dikembangkan dalam studi sosiologi. Konstruktivisme memiliki 2 gagasan yaitu, (1) mereka yakin bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih di tentukan oleh

shared ideas (gagasan yang diyakini bersama) dari pada gagasan material; (2) kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan actor-aktor lebih ditentukan oleh shared ideas dari pada faktor-faktor alam.

Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya). Jika kita melihat SDGs ini dengan metode konstruktivisme, bisa dilihat dari tujuan yang terakhir yaitu kemitraan selain itu dalam pembuatan SDGs ini sendiri juga melibatkan banyak actor, adapun pemerintah, stakeholder non-pemerintah dan dalam pelaksanaannya pun tetap membutuhkan masyarakat. Selain itu ada Kerjasama-kerjasama yang dibuat seperti Kerjasama dengan filantropi. Adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk membahas permasalahan yang terjadi, dan saling membagi ide atau shared ideas antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.

Dari apa yang telah dijabarkan, masih kurang banyaknya informasi mengenai SDGs ini di era globalisasi, dari bahan bacaan yang saya dapatkan tidak sepenuhnya memuat bagaimana SDGs ini mempercepat globalisasi, juga kurangnya informasi mengenai kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan. Selain itu tidak memuat contoh yang dapat mempermudah kita dalam menjelaskan permasalahan ini.

PENUTUP

SDGs telah melakukan banyak cara untuk

mempercepat globalisasi di Kawasan Asia-Pasifik salah satunya dengan kemitraan, dengan semakin luasnya kemitraan, dapat membantu suatu negara untuk meningkatkan pembangunan di wilayahnya, dari berbagai sektor, seperti ekonomi, dan lingkungan. Selain itu SDGs juga mendorong adanya green economy untuk membuat keadaan ekonomi yang lebih baik, dan secara langsung melestarikan dan merawat lingkungan, dari semua yang telah dilakukan yang paling menonjol dalam mempercepat globalisasi ini yaitu kerjasama antar negara, salah satunya bertukar informasi untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, dan mempercepat dalam mencapai tujuan yang telah dibuat.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Dampak Perubahan Iklim Kepada Pembangunan dan Diplomasi di Asia Pasifik

Timothy Rompies

ABSTRAK

Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim (Climate change). Climate Change ini sangat berdampak kepada factor-faktor fisik dan biologi di dunia. Kawasan Asia Pasifik sendiri merasakan dampak dari Climate Change. Saat Climate Change ini terus terjadi, banyak es di Kutub Utara dan Selatan mencair yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Dimana hal ini mengancam negara kepulauan kecil di Asia Pasifik. Permukaan air yang naik ini dapat mengancam negara-negara ini dapat tenggelam. Ancaman itu kini sudah menjadi kenyataan bagi para penduduk pulau-pulau itu.

Negara-Negara kepulauan kecil di Asia Pasifik pun telah mengambil kebijakan-kebijakan yang tergolong tidak populis, dimana mereka memutuskan untuk memindahkan warga mereka ke negara lain yang aman. Dan tentunya Climate change ini berdampak kepada pembangunan dan Diplomasi di Asia Pasifik. Diplomasi iklim adalah yang mengubah persepsi kepentingan nasional, yang kemudian menyebabkan negara-negara memberikan instruksi berbeda kepada negosiatornya, yang artinya kita mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Ada beberapa titik masuk dan pendekatan berbeda untuk

diplomasi iklim.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Pemanasan Global, Diplomasi, Pembangunan, Asia Pasifik.

ABSTRACT

Global warming causes climate change. Climate change has impacts on physical and biological variables in the world. The Asia Pacific region itself is feeling the effect of climate change. Whereas with this climate change, the ice in the north and south is melting, causing sea levels to rise. Thus, the melting threatens small island countries in the Asia Pacific that causes the rising water level, which could sink these countries. This threat has now become a mainstay for the inhabitants of the islands. Small island countries in the Asia Pacific have taken policies that are not appeal to a lot of people, where they decide to move their citizens to other safe countries.

And of course, climate change has an impact on development and diplomacy in the Asia Pacific. Climate diplomacy is about changing perceptions of national perceptions, which then causes countries to differ in their negotiators, which means we get a better deal, so there are several approaches to climate diplomacy.

Keywords: Climate Change, Global Warming, Diplomacy, Development, Asia Pacific.

PENDAHULUAN

Pemanasan global sudah terjadi di dunia ini sejak dulu. Dunia yang semakin gersang ditambah dengan menipisnya lapisan Ozon yang tentunya menyebabkan panas yang dipancarkan oleh matahari menjadi lebih terasa. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis. Wilayah Asia Pasifik akan mengalami perubahan akibat dari kenaikan muka air laut global sebesar 3-16 cm pada tahun 2030 dan 7-50 cm pada tahun 2070 yang bervariasi dengan tinggi muka air laut regional (Preston et al 2006).

Kawasan Asia Pasifik adalah wilayah dengan keragaman budaya, ekologi, dan ekonomi tertinggi di dunia. Dampak perubahan iklim di Asia Pasifik menghasilkan akibat beragam pada berbagai negara. Hal ini bukan hanya perubahan iklim akan termanifestasi secara berbeda tetapi juga karena bervariasinya kapasitas negara-negara di Asia Pasifik memitigasi gas rumah kaca, kapasitas mengurangi kerentanan, dan beradaptasi pada perubahan iklim yang ekstrem ini. Tentunya tetap terjadi aktifitas politik untuk kepentingan tiap-tiap negara. Termasuk didalamnya diplomasi dan pembangunan akan tetap dijalankan.

Dampak pemanasan global serta climate change kepada benua Asia Pasifik juga beragam, seperti penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat dari naiknya air di benua ini seperti penyakit Malaria, Demam Dengue, Diarrhoeal Diseases. Jurnal ini berfokus juga kepada dampak Climate Change kepada perempuan. Wanita miskin sangat rentan terhadap risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim (Araujo and Quesada-Aguilar 2007), yang merupakan mayoritas penduduk miskin di kawasan Asia Pasifik (ADB 1999).

Selain meningkatnya risiko kesehatan perempuan sebagai akibat langsung dari bencana alam, perempuan dan anak perempuan juga menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual setelah bencana. (Bartlett 2008). Berbeda dengan tulisan ini yang lebih berfokus kepada dampak perubahan iklim untuk diplomasi dan pembangunan dan bukan penyakit yang ditimbulkan. Kemudian, tulisan ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan agar dapat lebih dalam untuk menjelaskan mengenai fenomena, kasus, dan temuan-temuan yang ada di lapangan.

ANALISIS

Telah ditunjukkan bahwa bantuan internasional telah memprioritaskan upaya pemulihan bencana daripada pengembangan kapasitas adaptif di negara berkembang. 134 Peningkatan kapasitas di tingkat lokal, regional dan nasional dapat berkontribusi secara simultan untuk meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan bencana, perilaku pen-

-carian kesehatan dalam peristiwa iklim ekstrim, dan, secara keseluruhan, ketahanan berkelanjutan terhadap risiko kesehatan dan konsekuensi perubahan iklim dalam jangka panjang.

Meningkatnya curah hujan telah terpantau di sebelah timur Amerika Utara dan Amerika Selatan, Eropa Utara, Asia Tengah dan Selatan. Kekeringan terpantau di Sahel, Laut Tengah, selatan Afrika dan selatan Asia (IPCC WGI 2007). Sangat mungkin peristiwa-peristiwa cuaca panas ekstrem, gelombang panas, dan hujan lebat akan terus berlangsung dan semakin sering. Berdasarkan sederetan model, sangat mungkin siklon tropik di masa datang akan menjadi lebih intensif, dengan kecepatan angin puncak yang meluas dan hujan yang lebih lebat seiring dengan meningkatnya SSTs Tropik.

Menanggapi meningkatnya kesadaran dan bukti risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim, WHO dan UNDP pada tahun 2010 memulai sebuah proyek tentang adaptasi kesehatan masyarakat terhadap perubahan iklim. Ini adalah proyek global pertama yang berfokus pada penguatan kapasitas adaptif negara sistem kesehatan termasuk praktisi di lapangan untuk menangani risiko kesehatan secara efektif terkait dengan perubahan iklim. Tujuh negara dipilih untuk proyek ini, di antaranya 3 berada di kawasan Asia-Pasifik: Bhutan, China dan Fiji. Tujuan dari proyek ini adalah untuk “meningkatkan kapasitas adaptasi sistem kesehatan nasional lembaga, termasuk praktisi lapangan, untuk menanggapi risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim.”

Tujuan umum proyek ini termasuk memperkuat peringatan dini dan peringatan dini tindakan; peningkatan kapasitas pemangku kepentingan nasional; menguji coba intervensi pengurangan risiko tentang masalah kesehatan tertentu; dan dokumentasi serta berbagi pelajaran yang didapat. Hak atas pembangunan, perubahan iklim akan berdampak pada sebagian besar masyarakat rentan di dunia seiring dengan lemahnya kapasitas masyarakat rentan beradaptasi. Komunitas rentan umumnya amat tergantung pada ekosistem yang sensitif untuk bertahan hidup dan berpenghidupan, dan memiliki kapasitas amat kecil karena mereka bukanlah emiter gas rumah kaca.

Perubahan iklim tidak terjadi pada ruang hampa: wilayah-wilayah rentan menghadapi banyak tekanan yang berdampak pada keterpaparan dan sensitifitas wilayah sesuai dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tekanan-tekanan ini memunculkan berbagai faktor seperti bahaya iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses pada sumber daya, rawan pangan, tren globalisasi ekonomi, konflik, dan insiden penyakit seperti HIV/AIDS (IPCC WGII 2007).

PENUTUP

Climate change memang sudah jelas berdampak kepada pembangunan diplomasi dimana kedua hal itu terhambat karena terjadi climate change. Negara-negara berfokus kepada pencegahan negara-negara pasifik terkena dampak dari climate change.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Konsep Blue Economy di Kawasan Asia Pasifik

Michael David Rinding Padang

ABSTRAK

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan wadah kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Selama ini banyak negara di Asia Pasifik telah lama menikmati hasil laut serta turunan pengolahan sebagai pendongkrak perekonomiannya. Di pihak lain, laut tetap sebuah ekosistem yang harus dijaga dan dikelola dengan baik.

Oleh karenanya, Blue Ocean atau model ekonomi biru merupakan visi pengembangan ekonomi Asia Pasifik di bidang kelautan dan perikanan yang tepat untuk menjawab tantangan dan peluang di era globalisasi ini. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengalisis bagaimana peranan dan upaya APEC dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi negara anggotanya melalui blue economy .

Kata kunci: Blue Economy, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), pembangunan berkelanjutan, industri perikanan.

ABSTRACT

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) is a forum for economic cooperation of Pacific Asian countries aimed at improving the welfare and economic growth of marine-minded and fisheries that are competitive and sustainable for the welfare of the community. So far, many countries in Asia Pacific have long enjoyed seafood and processing derivatives as a boost to their economy.

On the other hand, the sea remains an ecosystem that must be maintained and managed properly. Therefore, Blue Ocean or blue economic model is the vision of Asia Pacific economic development in the field of marine and fishery is appropriate to answer the challenges and opportunities in this era of globalization. In this paper, the authors try to analyze the role and efforts of APEC in facilitating the economic growth of its member countries through the blue economy.

Keyword: Blue Economy, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), sustainable development, fishery industry.

PENDAHULUAN

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah memiliki komitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model blue economy sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan yang berfokus pada ocean based economy artinya ekonomi yang berdasarkan kepada hasil laut. Sebagai salah satu forum kerjasama ekonomi yang bersifat multi-lateral, blue economy telah menjadi salah satu instrumen pelaksanaan diplomasi ekonomi APEC dalam rangka mewujudkan kerjasama kemitraan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

APEC sendiri mendefinisikan blue economy sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Model ekonomi ini diharapkan dapat yang mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, serta dapat menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan. Pembangunan kelautan yang kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan (unsustainable) umumnya disebabkan oleh pola pembangunan yang kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selain itu, penerapan pendekatan supply chain system yang tidak terpadu juga acapkali menjadi persoalan buruknya ekonomi biru di suatu negara.

Kemudian kurangnya sikap inklusif dan penggunaan alat pancing yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga menjadi salah satu alasan mengapa perindustrian kelautan dan perikanan ki-

an memburuk. Kelautan merupakan buatan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, Seiring masuknya globalisasi telah mengakibatkan penurunan ketahanan kelautan. Eksploitasi ikan secara besar-besaran tanpa terukur, penggunaan material yang tidak ramah lingkungan serta kurangnya pola pembangunan berbasis IPTEK membuat kelautan di Asia Pasifik berangsur-angsur mengalami penurunan sumber daya alam.

Oleh karena itu, diperlukan transparansi data serta pemberdayaan ekonomi kelautan yang berkelanjutan untuk memastikan, tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang terus melaju tetapi dapat menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. (McIlgorm, 2016) menjelaskan proyek-proyek model ekonomi biru dalam berimplikasi terhadap keuangan nasional di masa yang akan datang serta dampak sosial dan lingkungan bagi negara-negara berkembang. Berbeda dengan tulisan yang mencoba menganalisis dampak blue economy terhadap fenomena globalisasi di kawasan Asia pasifik dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif untuk dapat menjelaskan lebih dalam mengenai fenomena, kasus dan temuan-temuan di lapangan. Berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, berita serta laporan digunakan oleh penulis mendapatkan data.

ANALISIS

Tercapainya kesepakatan kerjasama blue economy yang disepakati oleh 21 negara Asia Pasifik sebagai fokus utama kerjasama kemitraan antar negara

anggota APEC, selain menunjukkan terwujudnya regionalisasi blue economy, yang juga menjadikan model ini sebagai integral pembangunan nasional anggota APEC. APEC telah menyepakati model blue economy sebagai fokus utama kerjasama kemitraan yang mencakup inovasi sektor perairan, energi dan pasokan pangan. Semua ini telah dituangkan dalam Deklarasi Xiamen yang disahkan pada pertemuan Tingkat Menteri Kelautan APEC keempat (The 4th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting/AOMM4) di Xiamen, Tiongkok pada 28 Agustus 2014.

Terdapat komitmen APEC terkait blue economy yakni, melakukan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap laut serta sumber daya kelautan, pengelolaan laut untuk ketahanan pangan, mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka. Selain itu, deklarasi ini juga menyepakati untuk memerangi penangkapan dan perdagangan ikan secara ilegal serta memperbaiki manajemen penangkapan ikan, meningkatkan pengelolaan berkelanjutan dari ekosistem kelautan serta meningkatkan perdagangan produk ikan dan kelautan secara terbuka dan bebas.

Melalui kesepakatan itu, setiap anggota APEC didorong untuk meningkatkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis ekosistem, pemanfaatan insentif ekonomi, dan instrumen berbasis pasar. Dari segi nasional, Indonesia – sebagai negara kemaritiman terbesar di dunia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki komoditas perikanan yang potensial, dapat memanfaatkan peluang itu untuk berkontribusi

secara nyata dalam tahapan kebijakan dan implementasi model blue economy di sektor industri perikanan.

Sebagai bentuk implementasi blue economy, APEC membagi kerjasama ini menjadi tiga bidang yang menjadi prioritas yakni pertama, konservasi ekosistem laut dan pesisir serta ketahanan terhadap bencana alam. Kedua, peran laut terhadap keamanan pangan dan perdagangan yang berhubungan dengan pangan, serta ketiga adalah terkait pengetahuan kelautan, teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, kerjasama Blue Economy di kawasan Asia-Pasifik kembali menegaskan mendukung untuk mengambil tindakan dalam mempromosikan konektivitas dan komunikasi di antara negara anggota untuk memfasilitasi arus barang, jasa, perdagangan dan investasi.

Kemudian, melalui kesepakatan tersebut, setiap anggota APEC didorong untuk meningkatkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan kelautan berbasis ekosistem, pemanfaatan insentif ekonomi dan instrumen berbasis pasar yang sesuai untuk menciptakan efisiensi dan memaksimalkan hasil ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan Blue Economy memerlukan pemahaman yang baik tentang kelautan dan peningkatan kemampuan teknologi untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya kelautan melalui inovasi. Dalam pengembangan dan kerjasama Blue Economy, keterlibatan sektor swasta yang sesuai dengan pandangan dan prioritas APEC dinilai sangat penting.

Anggota APEC didorong untuk menggali masukan dari sektor swasta termasuk usaha kecil dan menengah. dialog kebijakan dan kemitraan swasta publik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu, yang menjadi poin penting yang diatur dalam kesepakatan adalah mendorong anggota APEC untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan yang ramah lingkungan. Blue Economy dipilih sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, seperti energi laut terbarukan dan inovasi pembudidayaan perikanan yang berkelanjutan.

Sama seperti model ekonomi lainnya, ekonomi biru memiliki prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Salah satu prinsip ekonomi biru adalah efisiensi alam. efisiensi alam dapat dipahami sebagai mencontoh pada alam (ekosistem). Secara lebih lanjut, efisiensi alam dimaksudkan sebagai bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam secara efisien serta tidak mengurangi kekayaan alam tersebut, tapi justru memperkaya alam (shifting from scarcity to abundance). Kedua, Nir limbah (zero waste), limbah yang semula merupakan sesuatu yang dianggap tidak berguna dapat menjadi makanan/sumber energi bagi yang lain. Hal ini berdampak kepada keseimbangan ekosistem dalam sistem kehidupan.

Selain itu, pemanfaatan limbah juga menjadi energi dapat didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal lagi. Dengan demikian, masyarakat dapat bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi tanpa meninggalkan limbah

namun tetapi mendayagunakan kemampuan seluruh contributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya. Sesuai dengan prinsip-prinsip blue economy diatas, kebijakan kelautan dan perikanan semestinya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara seimbang. Diversifikasi kegiatan ekonomi juga diperlukan sehingga mampu meningkatkan jumlah dan keragaman produk yang bernilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat, namun dipihak lain, tetap menjamin perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.

Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan, menekankan pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut, dalam rangka meningkatkan secara menyeluruh taraf pemanfaatan sumber daya laut. Ekonomi biru dapat dilihat sebagai kebijakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environment (melestarikan lingkungan).

Terminologi blue economy telah diangkat dalam berbagai forum kerjasama internasional, seperti pada pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Moskow pada bulan February 2012.

Pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Paradigma pembangunan kelautan dengan mengadopsi konsep ekonomi biru diharapkan dapat membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut.

Hal ini sejalan dengan pengendalian ancaman pemanasan global, seperti: energi gas buang dan karbon sehingga dapat terwujud pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan upaya pengentasan kemiskinan. Contoh lain implementasi blue economy dalam industri perikanan melalui inovasi dan kreatifitas adalah dengan menggunakan teknologi alat tangkap ikan yang efisien, efektif, ramah lingkungan, dan mampu menjamin kualitas ikan hasil tangkapan. Pengembangan instalasi pendingin yang menggunakan tekanan air laut sebagai penggerak merupakan salah satu inovasi yang dapat diimplementasikan. Kemudian, Instalasi produksi es balok/ice cube dengan bahan baku air laut dapat diintegrasikan dengan penggunaan fish finder yang dihubungkan dengan jaringan satelit sehingga dapat menghemat route pelayaran kapal ikan.

Selain itu, terdapat juga penggunaan teknologi inovatif penyediaan benih unggul. Harapannya, penyediaan benih ini dapat mengembangkan spesies baru. penggunaan teknologi budidaya yang berbasis trophic level juga dapat menjadi agenda prioritas

dalam menjalankan ekonomi biru. Selain itu, pengembangan usaha dan investasi dengan model blue economy dapat diarahkan untuk mendorong berkembangnya usaha atau industri dan investasi inovatif dan kreatif yang mampu meningkatkan kinerja bisnis dan investasi yang secara ekonomi dan sosial lebih menguntungkan, namun tidak merusak lingkungan. Pertimbangan perlindungan lingkungan dimaksudkan tidak untuk menghambat atau menyebabkan pengeluaran ekstra namun sebaliknya, yaitu menggunakan sumber daya alam atau komoditas yang lebih efisien namun menghasilkan produk dan pendapatan yang lebih besar dan tanpa limbah.

Dengan sistem ini, setiap unsur yang terkandung di dalam bahan baku dimanfaatkan untuk dijadikan produk-produk yang bernilai tambah hingga tidak menyisakan apapun berupa limbah. Pengembangan bisnis dan investasi dalam industri perikanan dengan model blue economy merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan system manajemen laut yang baik yaitu, laut yang lebih produktif dan sehat, dengan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya kelautan, termasuk perikanan (productive ocean), sekaligus melindungi laut dari kerusakan, bahkan sehat (healthy ocean). Dengan model ini, pelaku bisnis dan investor dapat memanfaatkan setiap unsur yang ada pada bahan baku sebagai bahan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.

Dengan prinsip tersebut, keanekaragaman barang dan jasa dapat dihasilkan, sehingga memperbanyak kegiatan produktif dan mampu memper-

-luas lapangan kerja.

PENUTUP

Secara konseptual, prinsip dasar blue economy adalah sustainability atau berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini diartikan sebagai keadaan dimana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana yaitu secara ekologis berlanjut dan secara ekonomi menghasilkan manfaat. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga telah memiliki komitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model blue economy sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan dengan fokus pada ocean based economy.

Asia Pacific Economic Cooperation yang merupakan salah satu forum kerjasama bidang ekonomi yang bersifat multilateral, ini dapat dijadikan APEC sebagai instrument pelaksanaan kesepakatan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan diantara negara anggota dengan model blue economy. APEC mendefinisikan blue economy sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, model ekonomi yang mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Pembangunan tersebut harus didasarkan pada keterpaduan geografis, keterpaduan ekologis, keterpaduan antar stakeholders, keterpaduan antar sektor, dan keterpaduan antar ilmu pengetahuan.

Kelautan sebagai bidang yang terdiri dari multisektor, memerlukan sebuah kebijakan yang sinergis pada sektor ekonomi kelautan mengingat keterkaitan yang erat antar aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun diluar sektor, sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan. Dalam rangka menyusun keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan sehingga berkelanjutan, maka penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Upaya ASEAN Dalam Mengatasi Kabut Asap Lintas Perbatasan Singapura dan Malaysia Akibat Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Tahun 2019

Evangelista Myra Hardi Chrisselina

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menganalisis upaya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mengatasi kabut asap lintas perbatasan Singapura dan Malaysia akibat kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 2019 melalui metode kualitatif yang berfokus dalam kajian studi kasus. Studi Pustaka dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Bersumber pada data sekunder seperti berita, buku, jurnal, serta laporan tahunan, peneliti berupaya untuk merangkum data secara keseluruhan kemudian mencoba untuk menjelaskan kembali hasil dari penelitian tersebut.

Upaya ASEAN dalam mengatasi kabut asap lintas perbatasan Singapura dan Malaysia akibat kebakaran hutan Kalimantan pada tahun 2019 telah membuat lima negara anggota ASEAN lainnya kembali menerapkan Hazing Across Borders Action Plan. Perencanaan ini kembali digaungkan, sehubungan dengan membumbung tingginya kabut asap yang muncul akibat kebakaran hutan di Pulau Kalimantan pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan memburuknya kualitas udara bagi kesehatan manusia di sekitar kawasan tersebut.

Kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan tidak hanya dapat mengganggu aktivitas manusia tetapi juga, dapat menimbulkan gangguan kesehatan pernapasan seperti penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan kerusakan ekosistem bumi. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional terbesar se-Asia Tenggara memiliki andil besar dalam menangani isu yang terulang setiap tahunnya.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Indonesia, ASEAN, Kabut Asap, Lintas Perbatasan

ABSTRACT

This study tries to analyze the efforts of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in overcoming the cross-border smog of Singapore and Malaysia due to forest fires in Kalimantan in 2019 through qualitative methods focused on case study studies. The Literature Study was selected as a data collection technique in this study. Based on secondary data such as news, books, journals, and annual reports, researchers sought to summarize the overall data as writer tried to re-explain the results of the study. ASEAN's efforts to address the haze across the border between Singapore and Malaysia due to the

Kalimantan forest fires in 2019 have led to five other ASEAN member states re-implementing the Hazing Across Borders Action Plan. The declaration was echoed again, in connection with the soaring smog caused by forest fires on Kalimantan Island in 2019. This has led to worsening air quality for human health around the region. Haze caused by forest fires can not only interfere with human activities but also, can cause respiratory health disorders such as acute respiratory infections (ARI) and damage to the Earth's ecosystem. Therefore, ASEAN as the largest regional organization in Southeast Asia has a big role in dealing with issues that are repeated every year.

Keywords: Forest Fire, Indonesia, ASEAN, Haze, Cross Border

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan lahan di Kalimantan dan Sumatera bukanlah kali pertama terjadi. Persoalan ini acapkali berulang setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran hutan yang setiap tahun semakin parah, kini tidak lagi menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi permasalahan regional, dalam konteks ini, kawasan Asia Tenggara. ISPA merupakan salah satu dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat akibat adanya kebakaran hutan tersebut. Kesulitan bernapas hingga terjadinya penurunan kadar oksigen di paru-paru manusia dapat menyebabkan kematian seketika. Sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat dirugikan karena terjadinya penurunan produktivitas mobilitas, kantor dan sekolah terpaksa

harus dihentikan untuk sementara waktu, aktivitas transportasi juga mengalami keterlambatan keberangkatan bahkan beberapa harus ditunda.

Tidak hanya itu, kebakaran hutan yang terjadi di hutan Kalimantan dan Sumatera juga telah menyebabkan pencemaran asap lintas batas (Transboundary Haze Pollution) ke wilayah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, sebanyak 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar dari 120 ribu titik api sejak Juni hingga Oktober (Fajrian, 2019). Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan merupakan propinsi yang dinyatakan sebagai propinsi darurat asap oleh pemerintah pusat. Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah telah menjadi propinsi yang mengalami kebakaran hutan yang paling parah, hingga mencapai 23 dan 16 persen dari keseluruhan area.

BNPB melaporkan terdapat 120 ribu titik api yang berhasil dipadamkan lewat berbagai upaya seperti waterbombing, rekayasa cuaca, serta pemadaman api melalui jalur darat. Upaya pemadaman ini akhirnya semakin reda dengan adanya hujan besar pada Oktober 2015 yang berhasil menurunkan jumlah titik api secara drastis. World Bank telah mencatat, terdapat 28 juta jiwa yang terdampak dan mengalami kerugian akibat dari karhutla di sekitar kawasan kebakaran. Terdapat 19 orang meninggal, dan hampir 500 ribu orang mengalami ISPA. Asap yang dihasilkan dari karhutla Kalimantan dan Su-

-matra juga turut dirasakan hingga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pasca kebakaran hutan pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut untuk merestorasi 2 juta lahan gambut yang dilaporkan sangat mudah terbakar. Selain itu, pemerintah juga melaporkan upaya pemindahan perkebunan yang berada di atas gambut ke area non-gambut.

Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan kembali melanda. Kali ini kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kebakaran massif yang sangat hebat ini, membuat Presiden Joko Widodo mengumumkan status siaga darurat di keenam provinsi tersebut. Luas area lahan yang terkena akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data dari BNPB, tercatat total kawasan yang terkena dampaknya mencapai 942.484 hektar. Jumlah ini naik bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 529.266 hektar dan 2017 yang mencapai 165.483,92 (BNPB, 2019). Kebakaran hutan dan lahan juga telah berdampak ke negara-negara sekitar seperti Singapura, Malaysia dan Brunei.

Asap yang terus membumbung tinggi yang dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas ekonomi tersebut, membuat ketiga negara tersebut segera merespon dan turun terlibat dalam penanggulangan isu ekologi ini. Besarnya dampak yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 telah berdampak luas hingga melewati lintas batas negara. Asap kebakaran hutan yang su-

lit dikendalikan serta terganggunya produktivitas manusia dan lingkungan membuat tidak hanya pemerintah Indonesia saja yang turut andil dalam menangani masalah lingkungan tersebut tetapi juga organisasi regional seperti ASEAN dan masyarakat internasional. (Mokado, 2017) menjelaskan bagaimana respon Indonesia setelah meratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tahun 2015 serta apa saja upaya kerjasama Indonesia, Singapura dan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN mengatasi isu polusi asap kabut lintas batas.

(Friyatno, 2013) juga menjelaskan relasi kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera terhadap produksi pertanian. Kemudian (Rafina, 2013) memaparkan kebakaran hutan yang terjadi serta respon Singapura dan Malaysia dari perspektif hukum internasional. Selain itu, dalam menanggulangi isu kebakaran hutan ini diperlukan gagasan yang komunikatif bagi antar negara (Syaifulloh, 2012). Berbeda dengan kajian literatur lainnya, tulisan ini akan membahas upaya ASEAN dalam mengatasi kabut asap lintas perbatasan Singapura dan Malaysia pada tahun 2019 serta menganalisis isu lingkungan hidup dapat mempengaruhi pola pembangunan dan diplomasi di Asia Pasifik

Kemudian, tulisan ini juga disusun menggunakan metode kualitatif. Melalui teknik studi pustaka, penelitian ini menggunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, laporan dsb. Pendekatan deskriptif digunakan untuk dapat menggali lebih dalam untuk menjelaskan mengenai fenomena, kasus dan temuan-temuan di lapangan.

ANALISIS

Kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan Asia Tenggara. Selain karena kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan di hutan serta pihak perusahaan perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar lahan dengan mudah dan cepat serta mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya akan mineral. Tradisi inilah yang membuat kebakaran hutan terus berulang dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dewasa ini.

Akibat masalah kabut asap ini, hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura sempat memanas. Kedua negara tersebut melakukan aksi protes kepada Indonesia, bahkan Singapura sempat membawa masalah kabut asap ini pada tingkat PBB. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian untuk menanganai masalah asap kebakaran hutan Indonesia. Perjanjian ini diperlukan, mengingat persoalan kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan telah melintasi lintas batas suatu negara sehingga diperlukan kerjasama negara – negara yang terkena dampak. Selain itu, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang merupakan negara anggota ASEAN, mendapatkan keuntungan dalam pemecahan masalah, dengan ASEAN sebagai wadah forum diskusi dan fasilitator penyelesaian masalah.

ASEAN sebagai organisasi regional terbesar di Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi isu kebakaran hutan ini. Kesadaran pentingnya isu karhutla telah dimulai pada awal tahun 1980-an. Kebakaran hutan yang mulai kerap

terjadi membuat ASEAN mulai mengumpulkan ide terhadap masalah kabut dan asap baik, di tingkat nasional maupun regional. Selang 8 tahun kemudian, tahun 1992, diadakanlah Konferensi Bandung untuk mengatasi masalah penyebaran asap lintas batas negara. Selain itu, dibentuk pula, serangkaian workshops di Indonesia dan Malaysia pada periode 1992 – 1995 sehingga terbentuknya Haze Technical Task Force (HTTF) pada September 1995. Terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan yang sangat besar pada tahun 1997 membuat HTTF bertransformasi dan meluaskan cakupannya menjadi Regional Haze Action Plan (RHAP) di bulan Desember 1997.

Berbagai action plans dan workshops inilah yang menjadi cikal bakal ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia oleh kesepuluh Negara anggota ASEAN yang mulai berlaku pada 25 November 2003 kemudian diratifikasi oleh Sembilan Negara anggota ASEAN, kecuali Indonesia (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, n.d.). Peristiwa kabut asap lintas batas terakhir pada tahun 1997 telah membuat para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN mengesahkan RHAP, untuk menetapkan langkah-langkah kerja sama yang diperlukan di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi masalah kabut asap di kawasan yang timbul dari kebakaran lahan dan hutan.

RHAP bertujuan pada tiga bidang prioritas: pencegahan kebakaran hutan melalui kebijakan dan penegakan pengelolaan yang lebih baik; menetapkan

-mekanisme operasional untuk pemantauan; dan memperkuat kemampuan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan regional, serta langkah-langkah mitigasi lainnya. RHAP adalah rencana regional dimana negara-negara pemimpin ditunjuk untuk bertindak sebagai pelaksana titik fokus dalam operasionalnya seperti; Malaysia memimpin dalam pencegahan; Singapura dalam pemantauan; dan Indonesia dalam mitigasi.

Pada tahun 2019, lima negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Indonesia telah sepakat untuk menangani permasalahan kabut asap. Konsensus itu tercapai selama perhelatan 21st Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution di Brunei. Kelima negara ini berjanji meningkatkan tindakan pencegahan untuk meminimalkan timbulnya kabut asap di seluruh wilayah selama musim kemarau. Mereka pun sepakat meningkatkan kerja sama dalam mengatasi polusi kabut asap di seluruh wilayah secara efektif. Hal itu akan dilakukan dengan kembali menerapkan Hazing Across Borders Action Plan atau RHAP. RHAP merupakan rencana penanggulangan kabut asap tingkat regional yang menyerukan langkah-langkah pencegahan dan pemantauan kebakaran lahan dan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pemadam kebakaran.

Dalam kesepakatan aksi ini, negara-negara tetangga diwajibkan untuk membantu pergerakan personel dan peralatan ke titik api. Selain itu, negara asal kebakaran diwajibkan untuk segera me-

nanggapi permintaan informasi dari negara pemohon (Environment, n.d.). Kabut asap telah menyebabkan kualitas udara menjadi sangat buruk. Kualitas yang sangat buruk ini tidak hanya membuat kesulitan untuk bernapas, tetapi juga munculnya berbagai macam gangguan kesehatan di organ pernapasan. Kabut asap ini juga mengganggu perekonomian negara anggota ASEAN. Secara tidak langsung, aktivitas perekonomian harus terhenti. Kegiatan ekspor impor mengalami penurunan performa mengingat mengganggu asap kabut dalam beraktivitas.

Di lain pihak karhutla juga menyebabkan penundaan dan pembatalan sebagian penerbangan dari dan ke Asia Tenggara. Besarnya jumlah pembatalan tersebut kemudian mempengaruhi pemasukan dari industri pariwisata di negara – negara terdampak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ASEAN memiliki peranan penting dalam merumuskan masalah dan menemukan solusi. Gagasan, ide serta norma bersama diperlukan untuk mencapai solusi bersama.

PENUTUP

Kabut asap di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya kebakaran hutan di wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan ini mengakibatkan penyebaran asap dan pencemaran lingkungan lintas batas negara. Pencemaran asap tersebut memiliki dampak negatif yang dapat merugikan manusia, mencemari lingkungan, dan merusak ekosistem. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia kini tidak lagi menjadi persoalan nasional saja. Kabut asap yang telah melintasi batas nega-

-ra telah membuat persoalan ini berkembang menjadi masalah regional. Malaysia dan Singapura kerap kali harus mengalami asap kabut “kiriman” dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Mendesaknya persoalan ini diperlukannya Kerjasama dan diplomasi antar negara. Mengingat ketiganya adalah anggota ASEAN, ini menjadi keuntungan tersendiri dimana Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat memecahkan persoalan ini bersama dan berkelanjutan di satu forum yang sama.

Upaya ASEAN dalam mengatasi kabut asap lintas perbatasan Singapura dan Malaysia akibat kebakaran hutan Kalimantan pada tahun 2019 yaitu, dimana lima negara ASEAN yaitu, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand kembali melakukan perjanjian untuk menerapkan Hazing Across Borders Action Plan merupakan Langkah yang tepat. Perkerjaan rumah ini tidak dikerjakan seorang sendiri, diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak terutama negara-negara anggota ASEAN lainnya. Gagasan, ide, norma sosial dan prinsip bersama perlu ditentukan sejak dini untuk dapat menghentikan bencana buatan yang terus berulang tiap tahunnya. ASEAN yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Salah Satu Opsi Pembangunan di Kawasan Asia Pasifik

Adinda Salsabilla Riyalda

ABSTRAK

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) menemukan bahwa kinerja kawasan Asia Pasifik “buruk” pada target lingkungan yang paling terukur dalam laporan berjudul, 'Laporan Kemajuan SDG Asia dan Pasifik 2020'. Penemuan utama, kawasan ini merendahkan dan menghabiskan sumber daya lingkungannya. Dan prediksi kondisi tahun 2030 akan lebih buruk pada 20% indikator SDG dibandingkan pada tahun 2015. Meskipun kawasan ini telah membuat kemajuan dalam kemiskinan pendapatan, namun kemungkinan besar akan kehilangan semua target SDG dengan bentuk lain dari kemiskinan, kelaparan dan kesetaraan gender serta berkurangnya ketidaksetaraan di dalam dan antar negara pada tahun 2030.

ESCAP menyerukan untuk segera memperkuat hubungan data kebijakan di wilayah tersebut. Para penulis menyerukan agar kawasan ini mempercepat aksi SDG untuk membalikkan tren negatif dan melipatgandakan upaya untuk memperkuat sarana implementasi, termasuk memobilisasi pembiayaan tambahan untuk pembangunan dan mendukung negara-negara paling terbelakang di

kawasan itu untuk mengakses pasar global dan membangun kapasitas mereka untuk pengembangan statistik.

Kata Kunci: SDG, ESCAP, Asia Pasifik, data, indikator.

ABSTRACT

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) found that the Asia Pacific region is performing “poorly” against its most measurable environmental targets in its report, 'Asia and Pacific SDG Progress Report 2020'. The main finding, this area is degrading and depleting its environmental resources. And the predicted conditions for 2030 will be worse for 20% of the SDG indicators than in 2015.

Although the region has made progress in income poverty, it is likely to miss all SDG targets with other forms of poverty, hunger and gender equality and reduced inequality in within and between countries by 2030. ESCAP calls for the urgent strengthening of policy data linkages in the region. The authors call for the region to accelerate SDG action to reverse negative trends and redouble efforts

to strengthen means of implementation, including mobilizing additional financing for development and supporting the region's least developed countries to access global markets and build their capacity for statistical development.

Keyword: SDG, ESCAP, Asia Pacific, data, indicators

PENDAHULUAN

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) telah merilis laporan kemajuan SDG tahunannya (UN-ESCAP, 2020) Laporan menunjukkan kinerja kawasan Asia Pasifik “buruk” pada target lingkungan yang paling terukur. Wilayah ini mengalami kesulitan terbesar pada SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan SDG 13 (aksi iklim). Laporan berjudul, 'Laporan Kemajuan SDG Asia dan Pasifik 2020,' menunjukkan penemuan utama yaitu kawasan ini merendahkan dan menghabiskan sumber daya lingkungannya. Pada SDG 13, kawasan ini mengeluarkan setengah dari total emisi gas rumah kaca (GRK) dunia, dan emisinya meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000.

Pada SDG 15 (kehidupan di darat), 35% negara di kawasan ini melanjutkan tren deforestasi. Sebagai tambahan, kondisi tahun 2030 akan lebih buruk pada 20% indikator SDG tanpa tindakan segera untuk membalikkan tren saat ini. Laporan tersebut memprediksikan bahwa kawasan Asia-Pasifik tidak mungkin dapat memenuhi SDG apapun tanpa upaya bersama dari semua pemangku kepentingan.

Selain itu, kondisi pada tahun 2030 diprediksi akan lebih buruk pada 20% indikator SDG dibandingkan pada tahun 2015, kecuali jika tindakan segera diambil untuk membalikkan tren saat ini. Meskipun kawasan ini telah membuat kemajuan dalam hal kemiskinan pendapatan, namun kemungkinan besar akan kehilangan semua target SDG terukur yang terkait dengan bentuk lain dari kemiskinan, kelaparan dan kesetaraan gender serta berkurangnya ketidaksetaraan di dalam dan antar negara pada tahun 2030. Laporan tersebut juga mengamati bahwa ketersediaan data untuk indikator SDG telah “meningkat secara substansial,” dari 25% pada tahun 2017 menjadi 42% pada tahun 2020.

Data masih tidak tersedia untuk lebih dari setengah indikator SDG, termasuk beberapa SDG dengan kemajuan yang lambat. Dari hasil laporan tersebut, penulis akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah salah satu opsi model pembangunan yang ada, khususnya di Asia Pasifik. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan pada beberapa tujuan seperti pendidikan yang berkualitas (Tujuan 4), tanpa upaya ekstra, kawasan ini kemungkinan besar akan kehilangan semua 17 tujuan pada tahun 2030. khususnya, kawasan perlu membalikkan tren konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Tujuan 12) dan aksi iklim (Tujuan 13) di mana kawasan sedang mengalami kemunduran. Untuk sebagian besar indikator yang datanya tersedia, kawasan ini kemungkinan besar akan kurang dari target yang ditetapkan untuk tahun 2030. Untuk 20 persen dari indikator tersebut, kondisi pada tahun 2030 akan lebih buruk daripada di tahun 2015 kecuali jika tindakan segera diambil

untuk membalikkan tren saat ini.

Kawasan ini membuat kemajuan yang baik pada target SDG terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB per kapita riil di kawasan ini lebih dari dua kali lipat rata-rata dunia pada tahun 2017, dan pada saat yang sama, banyak negara di kawasan ini mengalami ketimpangan pendapatan yang lebih sedikit. Namun, untuk tumbuh lebih berkelanjutan dan berkeadilan, kemajuan ekonomi wilayah saat ini harus dibarengi dengan kesejahteraan manusia dan lingkungan yang sehat (reliefweb, 2020). Berbeda dengan penelitian yang di atas, penulis lebih menekankan program pembangunan berkelanjutan dapat menjadi opsi yang dapat dipilih oleh negara-negara di dunia sebagai model pembangunan nasional maupun internasionalnya. Tulisan menggunakan metode kuantitatif dengan melihat fenomena serta kausalitas hubungan dari setiap kejadian.

ANALISIS

Meskipun sukses besar dalam memenuhi target kemiskinan pendapatan, kawasan ini kemungkinan besar akan melewati semua target SDG terukur yang terkait dengan bentuk kemiskinan lain, kelaparan dan kesetaraan gender serta berkurangnya ketidaksetaraan di dalam dan antar negara oleh 2030. Kabar baiknya adalah bahwa daerah ini telah membuat kemajuan yang menjanjikan di banyak bidang sasaran (seperti ketahanan pangan, peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dan akses ke layanan sanitasi dasar) sehingga membangun dasar yang kuat untuk percepatan di masa

depan. Lebih dari separuh target terukur di mana kawasan Asia-Pasifik berada pada jalurnya berada di bawah empat tujuan tersebut. Namun, bahkan di dalamnya, kawasan ini masih belum mencapai target kritis, termasuk cakupan kesehatan dan akses ke fasilitas dan personel kesehatan, hasil pembelajaran, akses ke air minum yang dikelola dengan aman dan sanitasi dan kebersihan yang memadai, serta perdagangan manusia.

Upaya pembangunan di wilayah ini telah menghasilkan pencapaian signifikan pada tidak ada kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, kehidupan di darat, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat dan kemitraan untuk tujuan. Namun, kawasan Asia-Pasifik tidak dapat berharap untuk mencapai tujuan ini pada tahun 2030 tanpa upaya ekstra. Jika kawasan ini terus menjalankan bisnis seperti biasa, pada tahun 2030 tidak akan berhasil memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi kelompok penduduk yang paling rentan, ia akan berperilaku baik tanpa jaminan kesehatan, tidak akan ada cukup pekerjaan yang layak dan pekerjaan produktif dengan informal.

Pekerjaan rentan tetap ada pada tingkat tinggi, dan jumlah korban perdagangan manusia, pengungsi dan orang terlantar kemungkinan besar akan meningkat. Hanya ada sedikit kemajuan dalam industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan ketidaksetaraan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan kehidupan di bawah air. Untuk

mencapai tujuan tersebut, kawasan perlu meningkatkan kemajuannya dalam mendiversifikasi ekonominya, memperbaiki infrastruktur transportasi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan peluang, serta melestarikan ekosistem laut dan pesisir.

Selain pengurangan kemiskinan pendapatan, daerah ini telah mencatat kemajuan yang menjanjikan dalam beberapa target SDG yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk percepatan di masa depan. Misalnya, prevalensi kekurangan gizi telah turun dari 17 persen pada tahun 2000 menjadi 11 persen pada tahun 2017 (tetapi tingkat kemajuan ini tidak cukup cepat untuk mencapai target tahun 2030 untuk mengakhiri kelaparan). Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen nasional telah meningkat menjadi 19 persen, dari 13 persen pada tahun 2000 (namun proporsinya tetap di bawah rata-rata dunia yang sebesar 24 persen). Proporsi penduduk yang menggunakan layanan sanitasi dasar telah meningkat dari 48 persen menjadi hampir 75 persen sejak tahun 2000 (meskipun ini adalah tingkat kemajuan yang lebih cepat daripada rata-rata global, tingkat kemajuan tidak memadai bagi wilayah tersebut untuk mencapai targetnya dengan 2030).

Kawasan ini perlu mempercepat upaya untuk memenuhi ambisinya pada tahun 2030 dengan target berikut: meningkatkan ketahanan kelompok rentan terhadap dampak buruk bencana alam; memberikan perlindungan sosial bagi kelompok penduduk termiskin, meningkatkan akses ke layanan air minum dan sanitasi dasar bagi penduduk pedesaan,

mengurangi prevalensi stunting dan malnutrisi pada anak di bawah usia 5 tahun, memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan; kesempatan kerja yang sama dan kompensasi yang setara untuk laki-laki dan perempuan (khususnya untuk penduduk usia 15-24), menutup kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan bantuan pembangunan terutama ke negara-negara terbelakang (LDC).

Agenda 2030 bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab yang menghormati manusia dan planet ini sekaligus membawa kemakmuran bagi semua. Tren saat ini menunjukkan kemajuan yang baik pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dengan upaya percepatan, kawasan ini dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonominya yang cepat dengan kesejahteraan manusia dan lingkungan yang sehat. Untuk tumbuh lebih berkelanjutan dan lebih merata, kawasan perlu memprioritaskan target SDG untuk produktivitas ekonomi, lapangan kerja penuh dan pekerjaan yang layak, akses yang terjangkau dan adil ke infrastruktur yang andal, pertumbuhan ekonomi untuk LDC serta pangsa industri dalam ekonomi LDC, sementara meningkatkan ketahanan terhadap bencana, mengintegrasikan tindakan perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, mengelola bahan kimia dan limbah secara berkelanjutan, dan menggunakan sumber daya alam secara efisien.

Dari segi pembangunan lingkungan, kawasan ini perlu membalikkan tren yang menipis dan merusak sumber daya lingkungan. Perbaikan substansial masih diperlukan dalam efisiensi energi

dan porsi energi terbarukan dalam total konsumsi energi, limbah berbahaya, emisi gas rumah kaca, dampak bahaya terkait iklim dan bencana alam pada semua kelompok populasi (khususnya kelompok miskin dan rentan), kualitas udara dan pengelolaan sampah di perkotaan, bukti pencemaran laut dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem laut dan pesisir, pelestarian keanekaragaman hayati, dan perlindungan serta pemulihan ekosistem terkait air.

Agenda 2030 merupakan jalur terintegrasi menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan revitalisasi kemitraan di semua tingkatan dan di semua pemangku kepentingan dalam pembiayaan berkelanjutan, perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi teknologi, peningkatan kapasitas dan basis bukti untuk pembuatan kebijakan yang koheren. Tujuan 17 memberikan kerangka kerja untuk memantau keberhasilan dalam membangun kemitraan untuk implementasi regional Agenda 2030.

Agenda 2030 masih dapat dijangkau untuk kawasan Asia-Pasifik asalkan mempercepat upaya untuk memperkuat sarana pelaksanaan. Memperkuat regional dan internasional segitiga dan bilateral yang ada, mekanisme kerja sama, dan membangun yang baru, harus diutamakan untuk memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. LDC di wilayah tersebut membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk memastikan akses jangka panjang dan tidak terbatas ke pasar global. Meningkatkan investasi dan membangun kapasitas untuk pengembangan statistik, terutama di LDC dan negara-negara berkembang kepulauan kecil, adalah

kunci keberhasilan implementasi Agenda 2030 di kawasan Asia-Pasifik.

PENUTUP

Untuk mencapai ambisinya pada tahun 2030, kawasan ini perlu secara signifikan mempercepat kemajuannya atau membalikkan tren pada sebagian besar target lingkungan yang dapat diukur. Di antara target prioritas utama adalah yang terkait dengan aksi iklim, termasuk efisiensi energi dan pangsa energi terbarukan dalam konsumsi energi total, emisi gas rumah kaca, bahaya dan bencana alam terkait iklim, kualitas udara dan pengelolaan limbah di kota, dan dampak aktivitas manusia di ekosistem laut dan pesisir. Pola kemajuan yang paling beragam di subkawasan Asia-Pasifik diamati dalam tiga tujuan: pengurangan ketidaksetaraan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat.

Untuk mempercepat kemajuan secara keseluruhan, daerah perlu melipatgandakan upayanya untuk memperkuat sarana pelaksanaan. Khususnya, mendukung negara berpenghasilan rendah, terutama LDC, untuk mendiversifikasi pendapatan pemerintah dan memobilisasi sumber daya tambahan untuk pembiayaan berkelanjutan untuk pengembangan; penguatan mekanisme kerjasama bilateral dan segitiga regional dan internasional yang ada, dan membangun mekanisme baru untuk memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; mendukung LDC di kawasan untuk memastikan akses jangka panjang dan tidak terbatas ke pasar global; dan meningkatkan investasi, dan mem-

membangun kapasitas untuk pengembangan statistik, terutama di LDC dan negara berkembang kepulauan kecil.

Ketersediaan data sangat terbatas pada tujuan-tujuan dengan kemajuan lambat, yang menunjukkan perlunya memperkuat hubungan data-kebijakan. Hal ini dapat dicapai dengan komunikasi dan keterlibatan yang lebih efektif dengan pengguna data untuk meningkatkan permintaan dan investasi dalam statistik. menyelidiki sembilan bidang kapasitas yang diperlukan sistem statistik nasional untuk menanggapi permintaan data saat ini menunjukkan bahwa komunikasi dan literasi statistik, bersama dengan advokasi statistik dan peningkatan kesadaran, merupakan tantangan terbesar bagi negara-negara di kawasan.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Dampak Perubahan Iklim pada Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik (Studi Kasus Dampak Pola Pertumbuhan Ekonomi di India dalam Pencemaran Iklim Emisi CO₂)

Rana Yusrianti Meilina

ABSTRAK

Sejak lahirnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), negara-negara Asia Pasifik menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan SDG. Beberapa negara Asia Pasifik menghadapi tantangan perubahan iklim dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Seperti di India, perubahan iklim karena emisi CO₂ yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kemunduran pada energi yang terjangkau dan bersih. Perubahan menyebar luas dan berdampak terhadap tujuan SDG 7, SDG 8, SDG 12, dan SDG 13. Dalam penelitian ini melihat apakah pendapatan per kapita, penggunaan energi, keterbukaan perdagangan, dan harga minyak memiliki dampak terhadap emisi CO₂ antara tahun 1980 dan 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi yang berlaku di India tidak ramah lingkungan. Perubahan iklim ini menyebar ke negara-negara Asia Pasifik dan berdampak juga dengan masalah internal antar negara atau dalam hal diplomasi. Dalam penelitian ini, kerangka kerja SDG berusaha untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim di India dan bisa menjadi patokan

negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Pembangunan Berkelanjutan, India, Pertumbuhan Ekonomi, Diplomasi.

ABSTRACT

Since the inception of the Sustainable Development Goals (SDGs), Asia Pacific countries have faced difficulties in achieving the SDG goals. Several Asia Pacific countries face the challenges of climate change in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). As in India, climate change due to CO₂ emissions ultimately impacts economic growth and causes a decline in affordable and clean energy. Change is widespread and impacts the goals of SDG 7, SDG 8, SDG 12, and SDG 13. This study examines whether per capita income, energy use, trade openness, and oil prices have an impact on CO₂ emissions between 1980 and 2019. Results This study shows that the pattern of economic growth prevailing in India is not environmentally friendly.

This climate change is spreading to Asia Pacific countries and also impacts internal problems between countries or in terms of diplomacy. In this

research, the SDG framework seeks to solve the problem of climate change in India and can become a benchmark for other Asia Pacific countries.

Keyword: Climate Change, Sustainable Development, India, Economic Growth, Diplomacy.

PENDAHULUAN

Laporan perkembangan Sustainable Development Goals (SDG) terbaru (UN-ESCAP, 2019) di negara-negara Asia dan Pasifik menunjukkan ketidakefisienan negara-negara tersebut dalam menangani isu peningkatan emisi. Sementara negara-negara maju membuat kemajuan signifikan dalam mencapai masa depan energi yang aman dengan perbaikan kualitas lingkungan, negara-negara ini mengalami peningkatan emisi, bersamaan dengan menghadapi masalah keamanan energi. Pola pertumbuhan ekonomi berbasis bahan bakar fosil yang berlaku di negara-negara ini telah dianggap sebagai salah satu alasan utama di balik masalah tersebut.

Keteguhan ketergantungan pada solusi bahan bakar fosil ini memaksa negara-negara ini untuk mengambil langkah dari pencapaian tujuan SDG 13, yaitu aksi iklim. Karena negara - negara ini sebagian besar baru muncul di alam, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi mendapat prioritas lebih tinggi daripada mempertahankan kualitas lingkungan. Masalah ini telah ditekankan dalam laporan terbaru tentang pencapaian SDG oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN, 2019), sambil membahas tentang kecenderungan negara-negara ini untuk berinvestasi pada bahan bakar fosil, daripada berinvestasi dalam kegiatan iklim. Oleh karena

negara-negara ini lebih cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi. bahkan dengan mengorbankan kualitas lingkungan, dapat diasumsikan bahwa negara-negara ini akan cenderung memulai solusi bahan bakar fosil. Untuk mempertahankan proses produksi, negara-negara ini terus menghabiskan sumber daya alam. Mengambil isyarat dari wacana “Limits to Growth”, dapat diasumsikan bahwa terus menipisnya sumber daya alam dapat berdampak buruk pada pola pertumbuhan ekonomi (Meadows et al., 1972)

India menghadapi kesulitan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan ekonomi dan sekutu yang berlaku. Meskipun pembuat kebijakan berusaha keras untuk memastikan 100% listrik pedesaan di India, kemiskinan energi masih buron. Sebuah studi baru-baru ini oleh Bloomberg (Bello, 2019) telah merefleksikan bahwa elektrifikasi pedesaan mungkin tidak dapat mengatasi masalah kegagalan ketahanan energi di India, karena mempertahankan solusi energi alternatif mungkin sulit tanpa saluran distribusi yang tepat dan pendapatan rumah tangga yang berkelanjutan. Dalam hal ini, laporan Indeks dan Dasbor SDG untuk India oleh NITI Aayog (2019) menekankan pada tingginya ketergantungan ekonomi India pada minyak mentah, sekaligus menggambarkan kerentanan ekonomi India terhadap volatilitas harga minyak mentah.

Masalah ini berawal dari ketergantungan pada solusi bahan bakar fosil di India, dan ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi India mungkin telah menciptakan lingkaran setan kemiskinan energi.

Pada pencarian ini, penelitian ini berfokus pada evaluasi dampak pertumbuhan ekonomi dan faktor pendorong emisi karbon di India selama periode 1980–2019. Melalui eksplorasi ini, penelitian ini bermaksud untuk menyarankan struktur kebijakan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan secara berturut-turut menyelaraskan kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Karena negara-negara ini dicirikan sebagai negara yang lamban dalam mewujudkan SDGs, maka penyusunan garis besar kebijakan untuk negara-negara ini diantisipasi untuk membantu negara-negara berkembang lainnya untuk membakukan kebijakan mereka untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan membangun diplomasi yang lebih baik antar negara Asia Pasifik dengan cara membantu mengurangi pencemaran iklim. Perubahan iklim telah mengubah sistem internasional secara implisit. Panasnya suhu bumi serta meningkatnya pencemaran udara melalui asap pabrik dan kendaraan telah menjadi “pekerjaan rumah” bersama. (Uchiyama Natal, 2020) melihat penyebab perubahan iklim yang terjadi di Asia Pasifik dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan mengingat kawasan Asia Pasifik sendiri merupakan penyumbang gas emisi CO₂ terbesar dan hal ini menyebabkan pencemaran iklim.

Sedangkan (Panayotou & Ang, 1997; 2007) melihat dari sudut pandang produksi dalam negeri. Berbeda dengan penelitian ini yang mencoba untuk menganalisis dampak perubahan iklim terhadap program pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai prosedur penelitian melalui pengamatan, pendeskripsian fakta-fakta dalam variabel subyek dan objek secara lengkap dan akurat disusun menjadi data deskriptif dalam sebuah latar ilmiah agar memecahkan sebuah masalah. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen dan artikel dari media daring yang terkait.

ANALISIS

Mengingat pola pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara Asia, dan khususnya di India, pertumbuhan ekonomi tersebut dimungkinkan oleh konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil. Mengingat pertumbuhan ekonomi yang meningkat di negara-negara ini, mungkin tidak mungkin negara-negara ini bergantung pada sumber daya alam endogen untuk pembangkit energi, dan oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat, negara-negara ini perlu bergantung pada minyak mentah impor. Oleh karena itu, fluktuasi harga minyak akan tercermin pada fluktuasi produksi energi, dan akibatnya pada emisi CO₂.

Disamping itu, pola perdagangan internasional juga akan berdampak pada pola emisi CO₂, melalui penerapan kebijakan substitusi impor. Dengan kata lain, untuk periode penelitian 1980-2019, variabel independen yang ada sudah sesuai untuk menentukan tingkat emisi CO₂. Sejauh pemeriksaan asimetris diperhatikan, hasil tes Wald memvalidasi bahwa pemisahan variabel yang dipilih menjadi

perubahan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan adalah signifikan dan bermakna. Koefisien PDB yang tidak signifikan untuk perubahan yang tidak menguntungkan menunjukkan bahwa, seiring berjalannya waktu, tingkat emisi CO₂ tidak menurun secara substansial jika PDB per kapita mengalami penurunan.

Hubungan nonlinier antara CO₂ dan PDB menunjukkan bahwa, untuk mengejar tujuan ekonomi jangka panjang, India mungkin telah berkompromi pada masalah perlindungan lingkungan. Pengamatan ini kembali ke isu klasik tradeoff pertumbuhan-pembangunan, yang tercermin dalam laporan NITI Aayog (2019) dan UNESCAP (2019). Agenda pro-pertumbuhan yang berlaku di ekonomi Asia juga tercermin dalam kasus India, dan masalah ini dapat dikaitkan dengan pola pertumbuhan ekonomi India yang didorong bahan bakar fosil. Sedangkan studi oleh Wang et al. (2017) dan Shahbaz et al. (2019) mengabaikan dampak diferensial dari variasi naik dan turun dalam PDB terhadap emisi CO₂, segmen hasil ini dapat membawa implikasi kebijakan yang serius terkait penataan kembali pola pertumbuhan ekonomi di India. Pola pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan ini juga dialami di negara-negara Asia (Parker dan Bhatti, 2020). Menurut Gupta dan Goyal (2015), penurunan output nasional dapat mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan, tetapi solusi ini tidak dapat dilakukan, karena intervensi kebijakan harus dapat menginternalisasi eksternalitas lingkungan yang negatif melalui pola pertumbuhan ekonomi.

Melihat hasil ini, situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran untuk mencapai tujuan SDG 13, karena pola pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pencapaian tujuan aksi iklim. Argumen ini menjadi lebih jelas, ketika dampak dari pendorong pertumbuhan ekonomi lainnya dianalisis secara paralel dengan hasil ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak telah berkontribusi pada penurunan tingkat emisi CO₂ di India, yang ditunjukkan oleh koefisien negatif harga minyak. Dari bukti ini terwujud pola pertumbuhan ekonomi India yang tidak berkelanjutan, dan juga menunjukkan pentingnya solusi energi alternatif dan bersih tidak hanya untuk perbaikan kualitas lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keamanan energi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran untuk mencapai tujuan SDG 7, karena ketergantungan yang terus menerus terhadap minyak mentah dapat menimbulkan kesulitan dalam mencapai tujuan energi bersih dan terjangkau.

Saat berbicara tentang kepedulian India dalam mencapai tujuan SDG 7, dampak dari guncangan arah konsumsi energi terhadap emisi CO₂ perlu dianalisis. Koefisien konsumsi energi jangka panjang menunjukkan bahwa emisi CO₂ meningkat sebesar 0,485% jika konsumsi energi meningkat sebesar 1%. Artinya, variasi konsumsi energi yang menguntungkan sangat signifikan dalam meningkatkan tingkat emisi CO₂. Penggunaan listrik yang intensif telah memperluas cakupan konsumsi batu bara dan minyak mentah, yang menghasilkan pelepasan karbon yang lebih tinggi (IEA, 2019). Segmen hasil ini menunjukkan ketidakberlanjutan dari

hasil ini menunjukkan ketidakberlanjutan dari pola pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh energi di India, dan melengkapi dampak pergerakan harga minyak mentah pada emisi CO₂. Pengalaman ini mencerminkan skenario yang berlaku di negara Asia lainnya. Oleh karena itu, setiap intervensi kebijakan untuk menginternalisasi eksternalitas lingkungan negatif yang semakin intensif ini dalam perekonomian India dapat menjadi tolak ukur bagi negara-negara Asia lainnya.

Saat ini pembahasan mengenai energy-led growth di India menuntut adanya perpindahan sumber daya lintas batas, yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, serta pola emisi CO₂, melalui saluran konsumsi energi. Pergerakan sumber daya ini sebagian besar diatur oleh keterbukaan perdagangan, dan oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa hal itu akan berdampak pada emisi CO₂. Segmen hasil ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional di India mengikuti pola kelestarian lingkungan, dan ini dimungkinkan melalui substitusi impor bertahap oleh para pembuat kebijakan. Laporan baru-baru ini oleh Bank Dunia (Artuc et al., 2019) telah merefleksikan pencapaian pemerintah India ini, dan mereka menekankan untuk mereplikasi praktik ini untuk negara-negara Asia lainnya sebagai batu loncatan pertama untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Perubahan iklim dan masalah emisi CO₂ ini juga mempengaruhi diplomasi India dengan negara yang melakukan perdagangan internasional. Karena masalah ini, India harus mengurangi import minyak mentah dan merubah pola perdagangan internasional nya yang tidak menjaga lingkungan.

PENUTUP

Oleh karena permintaan minyak mentah tampaknya tidak elastis di sektor manufaktur India, oleh karena itu, pemberlakuan kebijakan substitusi impor dapat menyebabkan peningkatan permintaan energi di sektor ini. Kini, dengan paradigma permintaan energi yang semakin meningkat, para pembuat kebijakan akan memiliki insentif untuk mengubah pola konsumsi energi yang berlaku. Namun, perubahan pola konsumsi energi secara tiba-tiba atau semalam dapat berdampak negatif pada pola pertumbuhan ekonomi, yang sebagian besar didorong oleh konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil. pola pertumbuhan ekonomi India yang tidak berkelanjutan, dan juga menunjukkan pentingnya solusi energi alternatif dan bersih tidak hanya untuk perbaikan kualitas lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keamanan energi.

Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran untuk mencapai tujuan SDG 7, karena ketergantungan yang terus menerus terhadap minyak mentah dapat menimbulkan kesulitan dalam mencapai tujuan energi bersih dan terjangkau. Saat berbicara tentang kepedulian India dalam mencapai tujuan SDG 7, dampak dari guncangan arah konsumsi energi terhadap emisi CO₂ perlu dianalisis. Masalah ini terjadi karena India yang terlalu bergantung pada import minyak mentah. Perubahan iklim dan masalah emisi CO₂ ini juga mempengaruhi diplomasi India dengan negara yang melakukan perdagangan internasional. Karena masalah ini, India harus mengurangi import minyak mentah dan merubah pola perdagangan internasional nya yang tidak menjaga lingkungan.

Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan di Asia Pasifik:

Pengaruh Globalisasi terhadap Program Sustainable Development Goals di Asia Pasifik

Valentino

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki cakupan tujuan pembangunan global yang sangat luas. Target pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek lingkungan, masyarakat dan ekonomi ini diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Dalam peluncuran program SDGs, PBB meminta semua negara anggotanya untuk tetap memiliki tujuan-tujuan ambisius dan terus menjawab berbagai tantangan global di era kontemporer ini. Namun, dipihak lain, negara-negara di dunia juga dituntut untuk bertanggungjawab dalam memainkan peran tersebut. SGG's tidak lagi membicarakan soal pembangunan ekonomi saja tetapi juga, dituntut memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk menjaga masyarakat dan lingkungan global. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai pembangunan berkelanjutan terhadap fenomena Globalisasi di Asia Pasifik. Penulis mencoba melihat keterkaitan karakteristik konsep pembangunan berkelanjutan yang juga memasukkan nilai-nilai lingkungan hidup, kemitraan, kesetaraan gender serta pembangunan yang bertanggungjawab dengan fenomena Globalisasi yang semakin tak terhentikan. Gelom-

bang Globalisasi yang semakin dinamis memungkinkan nilai-nilai SDG's semakin dikenal dan menyebar. Sehingga segogyanya globalisasi dapat dikolaborasi dengan tujuan-tujuan SDGs. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan SDG

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Globalisasi, Asia Pasifik, Multilateralisme.

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) has a very wide range of global development goals. This sustainable development target covering environmental, community and economic aspects was launched by the United Nations (UN) in 2015. In launching the SDGs program, the United Nations called on all member states to remain ambitious and continue to address globalization challenges in this contemporary era. However, on the other hand, countries in the world are also required to be responsible in playing that role. SGG's no longer talk about economic development only but also, is required to have awareness and responsibility to maintain society and the global environment. This paper aims to analyze the

influence of the value of sustainable development value faced by the phenomenon of Globalization in Asia Pacific. The author tries to see the characteristic interrelationship of sustainable development concepts that also include environmental values, partnerships, gender equality and development that are responsible for the increasingly unstoppable phenomenon of globalization. The increasingly dynamic wave of globalization allows the SDG's values to become more known and spread. Therefore, joint efforts to be able to realize the goals of SDGs are needed.

Keyword: Sustainable Development, Globalization, Asia Pacific, Multilateralism.

PENDAHULUAN

Ketidakpuasan terhadap institusi dan globalisasi dapat terlihat dari adanya proses politik dan gerakan sosial yang semakin meluas di berbagai belahan dunia. Hal ini telah membuka celah globalisasi untuk semakin menyebar sehingga terjadinya multilateralisme. Fenomena ini berakar dari pasca perang dingin. Setelahnya Globalisasi telah mendasari terjadinya integrasinya global dan regional dalam aspek pertukaran pengetahuan dan teknologi serta munculnya budaya kontemporer. Hal ini juga yang menjadi tantangan bagi kerangka negara dan organisasi yang ada di tingkat global, regional dan nasional. Tantangan ini tidak terbatas pada dimensi tertentu, tetapi didasarkan pada bidang ekonomi, sosial, politik hingga lingkungan. Penyesuaian ekonomi makro, perdagangan, ketimpangan pendapatan, ketidakstabilan keuangan, migrasi, peru-

bahan iklim dan keamanan nasional juga termasuk tantangan yang harus dihadapi dalam era globalisasi ini.

Untuk menanggapi tantangan tersebut, diperlukan diplomasi multilateral untuk mencapai tujuan-tujuan SDG's di tengah gelombang globalisasi. Definisi multilateralisme menurut Ruggie (1993) adalah "An institutional form which coordinates behaviour among three or more States on the basis of generalized principles of conduct". Melalui definisi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga atau lebih negara yang bekerjasama untuk membentuk suatu prinsip dalam penyelesaian sebuah masalah. Multilateralisme dan globalisasi secara intrinsik terkait, karena keduanya dicirikan oleh tindakan yang melampaui batas negara. Sejalan dengan dampaknya terhadap bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan, maka konsep globalisasi dipandang sebagai proses di mana dunia menjadi semakin saling berhubungan, khususnya melalui pertumbuhan pasar suatu negara, penyebaran kemajuan teknologi dan meningkatnya penyebaran gagasan dan teknologi.

Jones, Comfort, & Hillier, 2011 menjelaskan globalisasi telah berdampak kepada ekonomi internasional dari perspektif industri retail global. pada waktu yang sama, industri retail memiliki potensi untuk dapat mengejar memenuhi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan tulisan yang membahas relasi SDG dengan globalisasi serta bagaimana mekolaborasi keduanya untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang semakin tumbuh. Tulisan ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Harapannya, penulis dapat menggali lebih dalam lagi berbagai fenomena serta temuan-temuan di lapangan kemudian dijelaskan kembali.

ANALISIS

SDGs dan target terkait berlaku untuk semua pembangunan baik negara maju maupun negara berkembang. Agendanya jelas, untuk memperlihatkan kesamaan tantangan global dan serta kebutuhan barang dan jasa secara global. Pemberian solusi pada tingkat nasional tidak akan mungkin mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan akan menjadi sangat penting untuk memungkinkan implementasi agenda SDG. Kemitraan yang diperkuat untuk pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memobilisasi secara signifikan jumlah sumber daya yang lebih besar dari kerangka agenda sebelumnya, yakni Sasaran Pembangunan Milenium. Hal ini juga menanggapi kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan yang keberlanjutan melalui sektor pengambilan kebijakan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya sekadar "bisnis sebagai biasa" yang hanya mencari keuntungan semata tetapi juga harus bertanggungjawab terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Hal ini memang, itu membutuhkan perubahan pola pikir dan kerjama.

Agenda pembangunan berkelanjutan adalah kerangka kerja, yang mana berprinsip nilai tanggung jawab bersama untuk mengupayakan tindakan bersama melalui inklusif dan proses yang transparan untuk mengarah kepada keterlibatan

aktif dan kepemilikan kelompok spektrum masyarakat luas. Kemitraan yang inklusif dan inovatif menjadi pendorong pembuatan kebijakan utama dan sangat penting untuk menghasilkan adaptasi solusi. Agar siklus ini dapat berjalan, pembagian tugas dan pencapaian dibagi di antara mereka anggota masyarakat - termasuk lima elemen utama di bawah ini - perlu ditangani melalui integrasi dan kebijakan dan kerangka kerja publik yang inklusif. Dengan begitu, keseimbangan yang dapat diterima tercapai dan arahan ini akan menjadi kontrak sosial baru.

Pemberantasan kemiskinan yang merupakan salah satu tujuan SDG secara umum menjelaskan mengenai ketimpangan sosial yang berada ditengah masyarakat. Distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi serta menjaga lingkungan hidup di suatu negara merupakan komponen penting dari pengentasan kemiskinan. Kemiskinan juga terkait dengan pengucilan dari proses politik, yang dapat terus berlanjut kemiskinan, karena masyarakat dan sistem politik mungkin gagal melayani mereka yang paling membutuhkan. Ketimpangan lainnya juga dapat diartikan dengan tujuan lingkungan dari agenda yg ditetapkan tersebut, termasuk, sebagai biaya yang terkait dengan degradasi lingkungan tidak terdistribusi secara merata, mempengaruhi mereka yang berada di paruh bawah pendapatan distribusi paling banyak. Kerusakan ekosistem tanah atau air secara signifikan merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya ini untuk mata pencaharian mereka.

Kaum miskin juga sangat menderita akibat

dampak buruk dari perubahan iklim. Seperti yang telah ditunjukkan oleh penelitian, perubahan iklim yang tidak dapat dikurangi akan merugikan pembangunan dan negara kurang berkembang dan penduduknya. Menurut (Jackson, 2009) menjelaskan bahwa perubahan iklim mengurangi pendapatan rata-rata hingga 75 persen pada akhirnya abad ini. Kegagalan untuk memberikan akses ke sumber daya dapat merusak kohesi sosial dan institusi, yang mengarah pada ketidakstabilan, konflik dan perang, membahayakan kemajuan SDG. Ketimpangan ini bisa menciptakan lingkaran ketidakstabilan politik dan konflik. Baik ketimpangan horizontal antar kelompok sosial maupun ketimpangan vertikal antar kelompok individu telah diidentifikasi sebagai pendorong utama konflik kekerasan. Ketimpangan yang memicu konflik didasarkan tentang eksklusi sosial menurut etnis, budaya, bahasa dan karakteristik lainnya.

Pola pengucilan ini cenderung menciptakan jebak ketimpangan yang menjadi lahan subur bagi kekerasan dan ketidakstabilan. Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas sama pentingnya untuk mencapai hal tersebut tujuan. Keterkaitan faktor-faktor globalisasi dapat saja berdampak buruk dengan memberikan kontribusi tidak setara dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang terintegrasi perlu menjadi inti dari upaya untuk mencapai hasil yang lebih adil dan seimbang. Fase pembuatan kebijakan merupakan tahap yang penting agar rancangan kebijakan dapat diintegrasikan di antara ketiganya dimensi pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks globalisasi, kebijakan perlu dibuat pengakuan ketidakseimbangan yang dapat timbul dari perdagangan dan bisnis global. namun, seiring dengan meningkatnya kebijakan di bidang ini kompleksitas karena tumpang tindih konteks nasional dan global, penilaian dampak adalah kunci untuk memastikan hasil yang seimbang yang memperhatikan sepenuhnya konteks nasional di mana kebijakan tersebut diperkenalkan.

Berkenaan dengan perdagangan internasional, kebijakan yang berupaya mendorong perdagangan perlu mempertimbangkan pengaruhnya di ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Sedangkan liberalisasi perdagangan memiliki andil dalam perekonomian pertumbuhan dan kemakmuran dalam berbagai konteks, kesepakatan di masa lalu sering dikaitkan dengan negative efek ekonomi dan sosial pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, tindakan yang mengekspos produsen lokal hingga persaingan dari pasar yang lebih maju atau produsen asing yang menerima subsidi di negara mereka asal dapat berkontribusi pada hilangnya pekerjaan dan marjinalisasi sosial.

PENUTUP

Globalisasi telah meningkatkan taraf hidup banyak orang, tetapi pada saat yang sama, globalisasi telah meninggalkan orang lain. Dalam konteks tantangan global yang dinamis, sangatlah penting untuk memulihkan dan menegaskan prinsip multilateralisme. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan memberikan persatuan internasional yang koheren kerangka normatif yang mempromosi-

kerjasama internasional untuk mencari solusi sementara masalah global menyadari bahwa setiap negara harus menemukan bauran kebijakannya sendiri sesuai dengan keadaan nasionalnya.

Oleh karena sifat faktor-faktor globalisasi yang saling terkait, maka kebijakan yang terintegrasi perlu dilakukan inti dari upaya untuk mencapai hasil yang lebih adil dan seimbang. Karena itu, integrasi kebijakan merupakan bagian integral mencapai tujuan akhir: membuka manfaat jangka panjang yang berasal dari berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan solusi dan, dalam melakukannya, mencapai SDG untuk semua.

REFERENSI

Darynaufal Mulyaman

- Akhlas, Adrian Wail. (2020). *Indonesia, LG clinch \$9.8b deal to build world's first integrated EV battery industry*. Diakses 11 Januari 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/30/indonesia-lg-clinch-9-8b-deal-to-build-worlds-first-integrated-ev-battery-industry.html>.
- Lee, J.-H., & Woo, J. (2020). Green New Deal Policy of South Korea: Policy Innovation for a Sustainability Transition. *Sustainability*, Vol 12(23), 10191. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/su122310191>
- Lee Jae-Hyeon. (2019). *Indonesia, a central pillar of Seoul's New Southern Policy: Korea Herald columnist*. Diakses 11 Januari 2021, <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/indonesia-a-central-pillar-of-seouls-new-southern-policy-korea-herald-columnist>
- Kim Yon-Se, (2020). *Korea kindles talks for eco-based 'pan Yellow Sea' economy*. Diakses 11 Januari 2021, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201213000093>
- Nasori. (2020). *Hyundai Announces \$1.55b Investment in Indonesian Electric Vehicle Plant*. Diakses 11 Januari 2021, <https://jakartaglobe.id/business/hyundai-announces-155b-investment-in-indonesian-electric-vehicle-plant/>
- Septiari, Dian. (2020). *Asia-Pacific countries not on track to reach sustainable development goals: UN*. Diakses 11 Januari 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/26/asia-pacific-countries-not-on-track-to-reach-sustainable-development-goals-un.html>.
- UNDP. (2021). *Sustainable Developments Goals*. Diakses 11 Januari, 2021, from <https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/sustainable-development-goals.html>

William Sulityo Wibowo

- ESCAP, U. (2019). *Asia-Pacific Not On Track To Achieve Any Sustainable Development Goal By 2030*. Bangkok: UN Report.
- Putten, F.-P. D., & Martin, X. (2020, June 24). *China's Infrastructure Investment & Environmental Sustainable*. Retrieved from Clingendael.org: <https://www.clingendael.org/publication/chinas-infrastructure-investment-environmental-sustainability>
- Reuters. (2019, July 30). *China Belt and Road power investments surge from 2014-2019: study*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-china-renewables-silkroad/china-belt-and-road-power-investments-surge-from-2014-2019-study-idUSKCN1UP093>
- Xiheng, J. (2019, September 29). *China's green road to sustainable development*. Retrieved from Global Times : <https://www.globaltimes.cn/content/1165851.shtml>

Renalda Ester Angkouw

- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. (2018). *CLMV Countries Must Go Beyond Regional Integration*. Diakses melalui <http://www.eria.org/news-and-views/clmv-countries-must-go-beyond-regional-integration/>
- Food and Agriculture Organization. (2020). *FAO: Cambodia at a glance*. Diakses melalui <http://www.fao.org/cambodia/fao-in-cambodia/cambodia-at-a-glance/en/>
- National Bank of Cambodia. (2020). *Tourist Arrivals in Cambodia increased to 23028 in August from 20689 in July of 2020*. Diakses melalui <https://tradingeconomics.com/cambodia/tourist-arrivals>
- OECD. (2018). *OECD Development Co-operation Peer Reviews: Korea*. Diakses melalui <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264288829-15-en/index.html?itemId=/content/component/9789264288829-15-en>
- Puthikar, K. (n.d). *Globalization, Tourism and Cambodia: The Domino Effects*. Diakses melalui <https://studylib.net/doc/7316264/tourism-and-globalization--cambodia>
- Shofa, J.N., (2018). *Asean Outperforms Global Economy: Report*. Diakses melalui <https://jakartaglobe.id/business/asean-outperforms-global-economy-report/>
- WIKI IAS. (2016). *GS2 CLMV Countries*. Diakses melalui <http://ias4sure.com/wikiias/g s 2 / c l m v - c o u n t r i e s / #targetText=CLMV%20stands%20for%20Cambodia%2C%20Laos,dueto%20various%20trade%20agreements>.
- World Bank. (2016). *The World Bank In Cambodia*. Diakses melalui <https://www.worldbank.org/en/country/cambodia>

Rudi Pangidoan

Al Jazeera. (2019). *Forest Fires Cost Indonesia \$5.2bn and Counting: World Bank*.

<https://www.aljazeera.com/economy/2019/12/11/forest-fires-cost-indonesia-5-2bn-and-counting-world-bank>. Di akses pada 3 November 2020.

Basarah, M. (2000). Prospek Kerja Sama Negara-negara ASEAN dalam

Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas. *Jurnal Hukum UII*, 15 (7).

BBC. (2019). *Indonesia Haze: Why Do Forests Keep Burning?*.

<https://www.bbc.com/news/world-asia-34265922>. Di akses pada 3 November 2020.

Environment Division of the ASEAN Secretariat. ASEAN Cooperation on Climate

Change. <https://environment.asean.org/asean-working-group-on-climate-change/#:~:text=ASEAN%20Member%20States%2C%20though%20not,social%20activities%20over%20the%20years.&text=ASEAN%20has%20played%20its%20active,change%20in%20the%20global%20community>. Di akses pada 3 November 2020.

Idayati, Ratna. (2007). Pengaruh Pemanasan Global (*Global Warming*) terhadap

Lingkungan dan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 7(1).

Pasuhuk, Hendra. (2009). Dampak Perubahan Iklim Global Pada Ekonomi Asia

Tenggara. DW. <https://www.dw.com/id/dampak-perubahan-iklim-global-pada-ekonomi-asia-tenggara/a-4213227>. Di akses pada 3 November 2020.

Traeger, Miranda. (2018). Mitigasi Perubahan Iklim di ASEAN: Dapatkah Solusi

Ditemukan dalam Game Theory Model?. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada. <https://pssat.ugm.ac.id/id/mitigasi-perubahan-iklim-di-asean-dapatkah-solusi-ditemukan-dalam-game-theory-model/>. Di akses pada 3 November 2020.

Triana, Vivi. (2008). Pemanasan Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, II (2).

Wijoyo, Suparto. (2012). Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas dalam

Perspektif Perjanjian Internasional. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika*, 27 (1).

Zulfikar, Achmad. (2013). Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah

Human Security di Kawasan Asia Tenggara. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mikhail Adam

ASEAN People Forum. (2020). *Alternative Regionalism From The Perspective Of Southeast Asian peoples*. Diakses melalui <https://smediavn.webex.com/smediavn/onstage/g.php?MTID=e13d0228639e9623a87a4eb4609d5fe42>

Hinggil Larasati

Asian Development Bank. (2018). *Mencapai Asia dan Pasifik yang Makmur, Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan*. Filipina: ADB.

Dr. Ir. Endah Murniningtyas, M. (2014). *PRAKARSA STRATEGIS PEMBANGUNAN KONSEP GREEN ECONOMY*. Jakarta: Bappenas 2014 .

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M. K.-R. (2016). *Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016*. Jakarta: BKSAP.

ILO. (2018). *Referensi Manual Serikat Pekerja untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030*. Jakarta: ILO.

Sekar Panuluh, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Jakarta: www.infid.org.

Sri Indah Wibinastiti (SIW), d. (2020, Juli Minggu). *PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN PASCA PANDEMI COVID-19*. pp. 1-14.

Timothy Rompies

Preston, B. Suppiah, R. Macadam, I. and Bathols, J. (2006) *Climate Change in the Asia/Pacific Region*. CSIRO Marine and Atmospheric Research.

IPCC Working Group I (2007) *The Physical Science Basis: Summary for Policymakers*.

IPCC Working Group II (2007) *Climate change Impacts Vulnerability and Adaptation: Summary for Policymakers*.

Friends of the Earth Australia (2005) *A Citizens Guide to Climate Refugees*.

New Economics Foundation and Bangladesh Centre for Advance Studies (2002). *The End of Development*:

Global Warming, Disasters and the Great Reversal of Human Progress. New Economics Foundation CANA (2006) *Social Impacts of Climate Change: Climate Change Impacts in Asia* <http://www.cana.net.au/socialimpacts/global/asia.html>

Peng, S. Huang, J. Sheehy, J. Laza, R. Visperas, R. Zhong, X. Centeno, G. Khush, G. and Cassman K. (2004)

Michael David Rinding Padang

APEC. (2015, November 20). *APEC HIGH LEVEL POLICY DIALOGUE ON FOOD SECURITY AND BLUE ECONOMY*. Retrieved from annex B - APEC High-Level Policy Dialogue on Food Security and Blue Economy Plan of Action: https://www.apec.org/Meeting-Papers/Annual-Ministerial-Meetings/2015/2015_amm/annexb

Indonesia, K. K. (2019, September 4). *KKP AJAK PERGURUAN TINGGI WUJUDKAN BLUE ECONOMY*. Retrieved from KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: <https://kkp.go.id/artikel/13443-kkp-ajak-perguruan-tinggi-wujudkan-blue-economy>

McIlgorm, A. (2016). Ocean Economy Valuation Studies in the Asia-Pacific Region: Lessons for the Future International Use of National Accounts in the Blue Economy. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 1-19.

Evangelista Myra Hardi Chrisselina

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. (n.d.). Retrieved from Haze Action Online: <http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>

BNPB. (2019, 12 30). *Kerugian Kebakaran Hutan dan Lahan Sepanjang 2019 mencapai 75 Miliar*. Retrieved from BNPB: <https://bnpb.go.id/berita/kerugian-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai-rp-75-triliun#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Luas%20area%20yang%20terkena,terkena%20dampaknya%20mencapai%20942.484%20hektar>.

Environment, A. (n.d.). Retrieved from <http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2015/06/fsh.pdf>

Fajrian. (2019, 09 18). *Membandingkan Karhutla di Indonesia pada tahun 2015 dan 2019*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-431485/membandingkan-karhutla-di-indonesia-pada-2015-dan-2019>

- Friyatno, S. M. (2013). Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian* .
- Mokado, L. O.-J. (2017). La Upaya Asean Dalam Penanggulangan Kabut Asap Lintas Batas Melalui Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution 2015. *Skripsi*.
- Rafina, R. (2013). Kerjasama Negara-negara ASEAN Dalam Mengendalikan Pencemaran Udara Lintas Batas Negara di Lihat dari Hukum Internasional. *Journal of International Law*.
- Syaifulloh, M. (2012). Pembentukan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Yunazwardi, M. I. (2020). Upaya Pembentukan Mekanisme Pertanggungjawaban Lingkungan Transnasional terhadap Polusi Kabut Asap di Asia Tenggara tahun 2015. *Journal Hubungan Internasional* .

Adinda Salsabilla Riyalda

- Asian Development Bank. (n.d.). *ADB and the Sustainable Development Goals*. From Asian Development Bank: <https://www.adb.org/site/sdg/main>
- Fernandez, H. A. (2020, Maret 30). Asia Pacific faring poorly on SDGs, marching backwards for two goals—UN. From Eco-Business: <https://www.eco-business.com/news/asia-pacific-faring-poorly-on-sdgs-marching-backwards-for-two-goals-un/>
- Komnas-HAM Indonesia. (2020, September 30). NHRI se-Asia Pasifik Berbagi Strategi Implementasi 2030 SDGs Agenda. From KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1575/nhri-se-asia-pasifik-berbagi-strategi-implementasi-2030-sdgs-agenda.html>
- INFID. (2020, April 27). Diskusi Virtual untuk Percepatan Transformasi SDGs di Kawasan Asia Pasifik . From INFID: <https://www.infid.org/news/read/diskusi-virtual-untuk-percepatan-transformasi-sdgs-di-kawasan-asia-pasifik>
- UN-ESCAP. (2020). Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020. Bangkok: United Nations Publication.

UN-ESCAP. (2020). Striking Lack of Progress on Environmental SDGs In Asia-Pacific, Reveals New UN Report. Bangkok: UN-ESCAP.

United Nations. (2020). Fast-tracking the SDGs: Driving Asia-Pacific Transformations. Bangkok: UN Publications.

Reliefweb. (2020, Maret 26). Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020. From reliefweb: <https://reliefweb.int/report/world/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020>

TEMPO.CO. (2020, Februari 11). Asia-Pacific Needs Better Data to Assure SDG Progress: UN FAO. From TEMPO.CO: <https://en.tempo.co/read/1306099/asia-pacific-needs-better-data-to-assure-sdg-progress-un-fao>

Rana Yusrianti Meilina

Ahmed, K., Long, W., 2012. Environmental Kuznets curve and Pakistan: an empirical analysis. *Proced. Econ. Financ.* 1, 4–13.

Ahmed, K., Rehman, M.U., Ozturk, I., 2017. What drives carbon dioxide emissions in the long-run? Evidence from selected South Asian Countries. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 70, 1142–1153.

Ali, W., Abdullah, A., 2015. The long-run relationship between economic growth, financial development, trade openness and CO2 emissions in Malaysia. In: *International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies (ISTMET)*. IEEE, Langkawi Island, Malaysia. Available at. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7359049>.

Ang, J., 2007. CO2 emissions, energy consumption, and output in France. *Energy Pol.* 35,4772–4778.

Ang, J., 2008. Economic development, pollutant emission and energy consumption in Malaysia. *J. Pol. Model.* 30 (2), 271–278.

Apergis, N., Ozturk, I., 2015. Testing environmental Kuznets curve hypothesis in Asian countries. *Ecol. Indicat.* 52, 16–22.

Asian Development Bank (ADB), 2019. Achieving energy security in Asia: diversification, integration and policy implications. Available at. <https://www.adb.org/publications/achieving-energy-security-asia>.

Atici, C., 2009. Carbon emissions in Central and Eastern Europe: environmental Kuznets.

Destek, M., Sinha, A., 2020. Renewable, non-renewable energy consumption, economic growth, trade openness and ecological footprint: evidence from organisation for economic co-operation and development countries.

International Energy Agency (IEA), 2019. SDG7: data and Projections: access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Available at. [http s://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections](http://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections).

Liang, L., Wang, Z., Li, J., 2019. The effect of urbanization on environmental pollution in rapidly developing urban agglomerations. *J. Clean. Prod.* 237 (10 November)

NITI Aayog, 2019. SDG India: Index & Dashboard 2019-20. Ogundipe, A., Alege, P., Ogundipe, O., 2014. Income heterogeneity and environmental Kuznets curve in Africa. *J. Sustain. Dev.* 7 (4), 165–180.

Septiari, Dian. 2020. “Asia-Pacific countries not on track to reach sustainable development goals: UN” *The Jakarta Post*, 26 Maret. Diakses pada 2 November 2020.

Valentino

D, S., Maclean, & H.Creech, O. B. (2010). ITCs, the Internet and Sustainable Development: toward a new paradigm. *International Institute for Sustainable Development* , 1-39.

Jackson, P. T. (2009, March 30). *Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy*. Retrieved from Sustainable development Commission : <http://www.sd-commission.org.uk/publications.php?id=914.html>

Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2011). Sustainability in the global shop window. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 256-270.

Jones, P., Wynn, M., Hillier, D., & Comfort, D. (2017). The Sustainable Development Goals and Information and Communication Technologies. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 1-15.

Ramirez, G. (2012). Sustainable development: paradoxes, misunderstandings and learning organizations. *The Learning Organization* , 58-76.

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah isu yang tidak asing lagi di Kawasan Asia Pasifik. Dinamika yang tercermin dari proses pembangunan dengan lingkungannya pun beragam. Ada pro, kontra, dan berbagai masalah lain yang menyertai dinamika isu ini. Pembangunan yang berkelanjutan sudah seharusnya menjadi cara yang selalu digunakan untuk menggerakkan masyarakat yang dinamis dan multi-dimensional. Hal ini lah yang coba disuarakan oleh para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Dinamika pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik adalah dinamika kontemporer yang tanpa disadari berada dekat dan lekat dengan kehidupan kita sehari-hari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kristen Indonesia